

TRANSISI DEMOKRASI DI TUNISIA PASCA ARAB *SPRING*

(Skripsi)

Oleh

VENTI NURBAITI



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TRANSISI DEMOKRASI DI TUNISIA PASCA ARAB SPRING

Oleh

VENTI NURBAITI

Arab *Spring* adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Arab Spring berawal dari peristiwa bakar diri seorang pemuda di Tunisia bernama Mohammed Bouazizi pada 17 Desember 2010. Ia membakar dirinya karena diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Tunisia. Peristiwa ini memnacing amarah warga Tunisia. Mereka lalu melakukan protes dan demonstrasi menuntut mundur rezim Ben Ali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring* dan mengidentifikasi tipe transisinya menurut konsep transisi yang dikemukakan oleh Samuel Huntington. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tunisia hanya memenuhi empat dari lima kriteria demokrasi Huntington. Indikator yang tidak berhasil dicapai adalah stabilitas terhadap sistem demokrasi. Indikator ini tidak tercapai karena negara terganggu oleh terorisme. Tipe transisi di Tunisia adalah tipe *replacement* atau pergantian. Hal ini terlihat dari peristiwa yang terjadi selama masa transisi mencerminkan karakteristik tipe transisi *replacement*. Pelopor transisi di Tunisia adalah warga negara Tunisia yang sebelumnya adalah kelompok yang lemah dalam rezim. Fase pertama transisi adalah penggulingan rezim yang dilakukan dengan unjuk rasa di Tunisia. Fase kedua yaitu tergulingnya rezim terjadi ketika Ben Ali dianggap mengundurkan diri setelah melarikan diri ke Arab Saudi. Fase ketiga adalah perjuangan setelah tergulingnya rezim. Fase ini diisi dengan pembentukan rezim baru yang lebih demokratis. Rezim yang terbentuk adalah rezim *Ennahdha* yang dipilih melalui pemilu tahun 2014 dan rezim Beji Caid Essebsi yang dipilih melalui pemilu tahun 2014.

Kata kunci: transisi demokrasi, Tunisia, Arab *Spring*

ABTRACT

DEMOCRATIC TRANSITION IN TUNISIA AFTER ARAB SPRING

BY

VENTI NURBAITI

The Arab Spring is a wave of demonstrations and protests taking place in the Middle East region. The Arab Spring began with the self-immolation of a young man in Tunisia named Mohammed Bouazizi on December 17, 2010. He burned himself for being treated unfairly by the Tunisian government. this event changes the anger of Tunisians. They then held protests and demonstrations demanding the withdrawal of the Ben Ali regime. This study aims to describe the process of democratic transition in Tunisia after the Arab Spring and identify the type of transition according to the transition concept proposed by Samuel Huntington. This research is a qualitative descriptive study. Data collection in this study uses literature study techniques. The results of this study indicate that Tunisia only fulfills four of five Huntington's democratic criteria. The indicator that was not successful was stability against the democratic system. This indicator is not achieved because the country is disturbed by terrorism. The type of transition in Tunisia is a type of replacement. This can be seen from the events that occurred during the transition period reflecting the characteristics of the replacement transition type. The transition pioneer in Tunisia is a Tunisian citizen who previously was a weak group in the regime. The first phase of the transition was the overthrow of the regime carried out with demonstrations in Tunisia. The second phase was the overthrow of the regime when Ben Ali was considered to resign after fleeing to Saudi Arabia. The third phase is the struggle after the overthrow of the regime. This phase is filled with the formation of a new, more democratic regime. The regime that was formed was the Ennahdha regime which was elected through the 2014 elections and the Beji Caid Essebsi regime was elected through the 2014 elections.

Keywords: democratic transition, Tunisia, Arab Spring

TRANSISI DEMOKRASI DI TUNISIA PASCA ARAB *SPRING*

Oleh

VENTI NURBAITI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **TRANSISI DEMOKRASI DI TUNISIA
PASCA ARAB *SPRING***

Nama Mahasiswa : **Venti Nurbaiti**

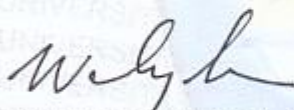
Nomor Pokok Mahasiswa : 1316071045

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

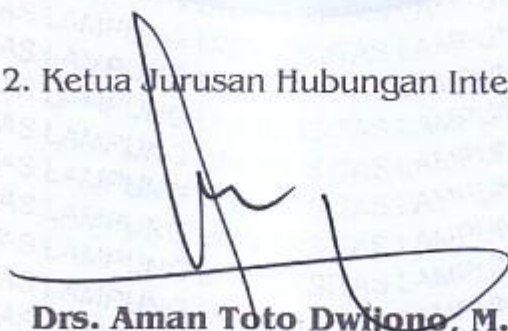


Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002



Moh. Nizar, M.A.
NIP 19830819 201504 1 005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

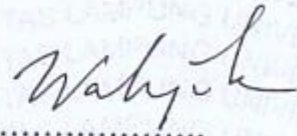


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

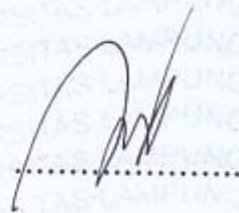
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

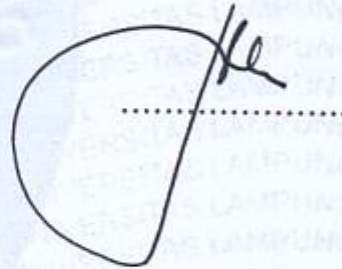
Ketua : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



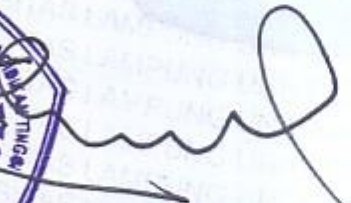
Sekretaris : **Moh. Nizar, M.A.**



Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590603 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Venti Nurbaiti

NPM 1316071045

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Venti Nurbaiti. Lahir di Waringinsari Barat pada tanggal 26 Juni 1995 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Solihin dan Ibu Heni Silviawati.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari Taman Kanak-Kanak Islam Bandung Baru, kemudian ke jenjang Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Waringinsari Barat pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung sebagai staf Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa pada tahun 2014-2015. Penulis telah menyelesaikan KKN Tematik di Desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016. Penulis menyelesaikan magang di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung pada tahun 2016.

MOTTO

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
(Q.S Ar-Ra’d:11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:6)

“Expectations should not always be taken as reality, because you never know when you will be disappointed.”
(Samuel P. Huntington)

“Usaha tidak akan mengkhianati hasil apabila kau libatkan Allah di dalamnya. Karena Allah sebaik-baik perencana, kau tidak akan pernah kecewa dalam hidupmu apabila kau percaya pada-Nya.”
(Venti Nurbaiti, 2018)

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua orangtuaku tercinta,
Papa Solihin dan Ibu Heni Silviawati
Sebagai bentuk cinta kasih dan baktiku

Adik-adikku tersayang,
Diana Aulia Nisa dan Safa Azzahra Husaina

Keluarga Besar Mbah (Alm.) Murtama,
atas semua dukungan, doa dan kasih sayang yang diberikan kepadaku

Serta, Almamater tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Transisi Demokrasi di Tunisia Pasca Arab Spring**” ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk keterbatasan kemampuan dan motivasi untuk terus belajar ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi kritik, masukan, motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini .

4. Bapak Moh.Nizar, M.A., selaku Dosen Pembimng Kedua yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, kritik, masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
5. Bapak Drs.Agus Hadiawan, M.Si., selaku Penguji yang telah memberikan kritik, saran, pengetahuan, dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Himawan Indrajat S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, kritik, saran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan staf yang telah membantu dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
8. Pengurus Bidik Misi Universitas Lampung.
9. Kedua orangtuaku, Papa Solihin dan Ibu Heni Silviawati yang selalu memberikan ridho, kasih sayang, cinta, materi, dan waktunya kepadaku. Terimakasih untuk semua usaha, doa, pengorbanan, dukungan dan nasihatnya kepadaku selama ini. Semoga Papa dan Ibu sehat selalu dan berada dalam lindungan-Nya.
10. Adik-adikku tersayng Diana Aulia Nisa dan Safa Azzahra Husaina, yang telah mewarnai hari-hariku, memberikan semangat dan canda tawa. Semangat untuk menggapai cita-cita kalian dan semoga kita bisa membahagiakan orangtua bersama-sama.
11. Keluarga besar Mbah (Alm.) Murtama yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi dan dukungan bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat ansosku Antonius Yudi Kristiyanto, Desi Oktavia, Hardani Kurniawan, Muhammad Suprani dan, Widia Ningsih. Terimakasih telah mewarnai hari-hari kuliahku dengan canda tawa dan sukacita. Terimakasih sudah mau kebersamaan dan menemani di saat suka, duka, kecewa dan bahagia. Terimakasih untuk dukungan, semangat, motivasi dan

kenangan manis masa kuliah. Kuliahku ga ada warnanya tanpa kelean guys. Sukses buat kita semua. *I love you all!*

13. Sahabat sekamar 317, Erika Widiastuti, Ana Marlina, Istikomah dan Galuh Pravita Sari. Terimakasih sudah menjadi pendengar setia segala keluhan, teman berbagi, menerima kekuranganku, canda tawa dan memori-memori indah selama menghuni kamar 317 di rusunawa Unila. *Keep in touch ya guys!*
14. Rahma Nuharja, S.H., yang selalu memotivasi dan mendukungku, terimakasih untuk kesabaran, waktu dan bimbingannya kepadaku selama ini. Terimakasih selalu mengajak dan mengajarkanku tentang kebaikan. Semoga Allah balas semua kebaikan hati Mas. Dan semoga Mas sukses dan bahagia selalu 😊.
15. Amalia Ayu Fitriani, S.E. terimakasih untuk kebersamaan dan kebaikan hatimu. Untuk semua pengertian dan waktumu mendengarkan segala curahan hati ini. *Thank you for never leave me* meskipun jarak memisahkan kita, **luvvvvv!**
16. Teman-teman angkatan 2013 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terimakasih untuk dukungan, motivasi dan kenangan indah masa kuliah. Sukses buat kita semua. *Let's rock the world!*
17. Keluarga kesmaku Dewi, Eka, Eli, Ela, Musi, Desmita, Diar, Fiqoh, Dini, Mba Sun, Kak Ali, Roby, Galih, Mulki, Reza, dan Jirin. Terimakasih atas kerjasama, pembelajaran dan canda tawanya. **HIDUP MAHASISWA!**
18. Keluarga KKN Desa Dadapan Reta, Dati, Kak Adriana, Yonathan, Suryadi dan Eko. Terimakasih atas kebersamaan dan kebaikan hati kalian selama masa KKN.. Terimakasih kepada mbah Naysilah selaku tuan rumah dan kebaikan hati Mbah.
19. Teman-teman dan admin *Werewolf Indonesia Reborn* (WWIR) terkhusus para LAMPUNK SQUAD, terimakasih telah menemani hari-hari revisianku dengan kemiskinan kelean. Semoga kita tetap solid dan makin micin. Moga makin banyak donatur biar makin banyak ipen, WQWQWQ.
20. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala keikhlasan dan kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018

Penulis,

Venti Nurbaiti

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
COVER SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian erdahulu.....	19
B. Landasan Teori.....	26

1. Konsep Demokrasi	26
2. Transisi.....	28
C. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37

IV. GAMBARAN UMUM

A. Politik dan Pemerintahan Tunisia sebelum Arab <i>Spring</i>	39
1. Demokrasi di Tunisia era Habib Bourguiba.	47
2. Demokrasi di Tunisia era Ben Ali.....	50

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Transisi Demokrasi di Tunisia Pasca Arab <i>Spring</i>	71
1. Transisi Demokrasi di Tunisia Pasca Tergulingnya Ben Ali	71
2. Pemilihan Umum Tunisia Tahun 2011	74
3. Transisi Demokrasi di Tunisia era Moncef Marzouki.	83
4. Pemberlakuan Konstitusi Baru Tunisia tahun 2014.....	95
5. Pemilihan Umum Tunisia Tahun 2014	99
a. Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tunisia tahun 2014	105
b. Pemilihan Umum Presiden Tunisia tahun 2014.....	110
6. Transisi Demokrasi di Tunisia era Beji Caid Essebsi	116
B. Tipe Transisi Demokrasi di Tunisia	123
C. Perbandingan Demokrasi di Tunisia Sebelum dan Sesudah Arab <i>Spring</i>	131
1. Demokrasi di Tunisia Sebelum Arab <i>Spring</i>	131
2. Demokrasi di Tunisia Setelah Arab <i>Spring</i>	134

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	144
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta kondisi negara-negara Timur Tengah pasca Arab <i>Spring</i>	16
2. Bagan Kerangka Pikir.....	34
3. Peta Negara Tunisia.....	40
4. Jumlah Kursi Berdasarkan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tunisia Tahun 2014.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Hasil perolehan suara pemilu Tunisia tahun 1994	57
2. Hasil perolehan suara pemilu Presiden Tunisia tahun 1999	57
3. Hasil pemilu legislatif Tunisia tahun 1999	58
4. Hasil perolehan suara pada pemilu Presiden Tunisia tahun 2004.....	59
5. Hasil perolehan suara pemilu legislatif Tunisia tahun 2004	59
6. Hasil pemilu legislatif tahun 2009	60
7. Tingkat pengangguran di Tunisia tahun 1966-2009	61
8. Pembagian kursi NCA pemilu legislatif Tunisia tahun 2011 berdasarkan daerah pemilihan	80
9. Hasil pemilu legislatif Tunisia tahun 2011	81
10. Data pemilih pada pemilu Tunisia tahun 2014	102
11. Hasil Pemilu Legislatif Tunisia tahun 2014	107
12. Hasil pemilu presiden Tunisia putaran pertama tahun 2014	113
13. Hasil pemilu presiden Tunisia putaran kedua tahun 2014	113
14. Perbandingan jumlah pemilih dan suara pada pemilu yang terselenggara setelah Arab <i>Spring</i>	115
15. Perbandingan pencapaian demokrasi di Tunisia sebelum dan sesudah Arab <i>Spring</i> menggunakan indikator demokrasi menurut Samuel Huntington.....	136

DAFTAR SINGKATAN

EU	: <i>European Union</i>
FDTL	: <i>Forum démocratique pour le travail et les libertés</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
LTDH	: <i>Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme</i>
MDS	: <i>Movement des Democrates Socialistes</i>
MTI	: <i>Mouvement de Tendance Islamique</i>
MUP	: <i>Popular Unity Movement</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NTC	: <i>National Transition Council</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCT	: <i>Communist Party of Tunisia</i>
PDP	: <i>Parti démocrate progressiste</i>
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PSD	: <i>Parti Socialiste Destourien</i>
PSL	: <i>Parti Social Liberal</i>
PUP	: <i>Parti de l'Unité Populaire</i>
RCD	: <i>Rassemblement Constitutionnel Democratique</i>
UDU	: <i>Union Democratique Unioniste</i>
UGTT	: <i>Union Générale Tunisienne du Travail</i>
UU	: Undang-Undang
NUG	: <i>National Unity Government</i>
NCA	: <i>National Constituent Assembly</i>
CPR	: <i>Congrès pour la République</i>
ISIE	: <i>Instance supérieure indépendante pour les élections</i>

PDM	: <i>Pôle Démocratique Moderniste</i>
DPP	: <i>Democratic Patriots Party</i>
ENP	: <i>European Neighbourhood and Partnership</i>
ARP:	<i>Assembly of the Representatives of the People</i>
HAICA	: <i>Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle</i>
UPL:	<i>Union patriotique libre</i>

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki dekade kedua abad ke-21, perubahan di kawasan Timur Tengah ditandai dengan geliat gerakan rakyat menggugat berbagai kepemimpinan nasional mereka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab (*Arab Spring*). Pada bulan Januari 2011, gelombang revolusi dan transisi terjadi di Tunisia kemudian menjalar ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Rakyat Arab menyebut peristiwa politik penting ini dengan sebutan *al-Tsaurat al-Arabiyyah* yaitu revolusi yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter, kekuasaan yang tidak dibatasi, pembatasan kebebasan masyarakat serta melahirkan kesenjangan antara *elite* (penguasa), yang hidup mewah, dengan rakyat yang miskin.¹ *Arab Spring* diyakini sebagai pintu gerbang demokratisasi di Timur Tengah.

Di Timur Tengah sendiri sebelumnya pernah terjadi demokratisasi. Pada gelombang demokratisasi kedua di kawasan Timur Tengah lahir beberapa

¹ Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 119, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

pemerintahan baru maupun negara-nasional baru seperti terbentuknya Republik Syria dan Libanon pada tahun 1941 serta pemerintahan Republik Arab Mesir pada tahun 1947. Namun, pada tahun 1970-an, Timur Tengah, diwarnai dengan berbagai revolusi seperti, revolusi rakyat Libya pimpinan Moamar Khaddafi pada tahun 1969 dan Revolusi Irak pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1971. Revolusi ini muncul sebagai reaksi dari sikap pemerintah yang otoriter. Pada gelombang ketiga, demokratisasi menjalar ke Iran pada tahun 1979. Revolusi Republik Revolusioner Islam Iran tahun 1979 pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi.²

Istilah *Arab Spring* menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab. *Arab Spring* adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di wilayah Arab. Para pengunjuk rasa di wilayah Arab mendengungkan slogan *Ash-sha'byurid isqat an-nizam* (rakyat ingin menumbangkan rezim ini). Sejak 18 Desember 2010, telah terjadi revolusi di Tunisia dan Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman dan protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Kerusuhan di perbatasan Israel pada Mei 2011 juga terinspirasi oleh kebangkitan dunia *Arab*.³

² Sidik Jatmika, 2013, *The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 159 <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/343/391> diakses pada 18 Desember 2016

³ Ibid hlm. 161

Protes ini menggunakan teknik pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Skype*, untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Banyak unjuk rasa ditanggapi keras oleh pihak berwajib, serta milisi dan pengunjuk rasa pro pemerintah.⁴

Gejolak Arab *Spring* adalah peristiwa yang bermula dari Tunisia ketika seorang pemuda berusia 26 tahun, Mohammed Bouazizi, seorang penjual sayuran yang melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Presiden Zein Al-Abidin Ben Ali. Pada 17 Desember 2010, Bouazizi bersama pedagang lainnya terjaring razia karena dianggap berjualan tanpa izin di Sidi Bouzid. Bouazizi sendiri harus menyetor denda 10 dinar (upah satu hari, setara dengan 7 USD) karena tidak memiliki ijin usaha. Namun, Bouazizi terus berjualan tanpa ijin dan juga tidak membayar denda. Hal tersebut menyebabkan ia dan gerobaknya menjadi salah satu target razia aparat setempat. Sudah menjadi hal yang lazim di Sidi Bouzid bahwa para pedagang kaki lima (PKL) harus memberikan uang suap kepada aparat untuk tetap bisa berjualan. Namun pada hari itu Bouazizi sedang tidak mempunyai uang untuk menyuap aparat. Pada hari tersebut ada oknum yang datang bersama rekannya memberitahukan bahwa ia tidak memiliki ijin sehingga gerobaknya akan disita dan Bouazizi harus membayar denda. Bouazizi tidak mengalah begitu saja sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara dirinya dan oknum aparat wanita bersama temannya tersebut.

⁴ Ibid hlm. 161

Bouazizi ditampar, wajahnya diludahi, timbangann dan gerobaknya juga disita serta mendiang ayahnya dihina oleh aparat tersebut.⁵

Perlakuan oknum terhadap Buoazizi yang sewenang-wenang tersebut membuatnya mengadu kepada Gubernur Sidi Bouzid. Pengaduan Bouazizi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, bahkan Gubernur menolak untuk melihat dan mendengarkan pengaduan nasibnya. Buoazizi mengancam untuk membakar dirinya setelah Gubernur mengabaikan kedatangannya. Ia kemudian pergi dan kembali satu jam kemudian dengan membawa dua botol bensin kemudian membakar dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah, Sidi Bouzid. Buoazizi sempat dilarikan ke rumah sakit dan Presiden Ben Ali sempat menjenguknya. Namun, Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011. Aksi bakar diri (*self-immolation*) yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas, melalui pemberitaan media-media nasional dan internasional, diikuti oleh demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter di negara-negara *Arab*, bukan hanya di Tunisia.⁶

Bouazizi sebenarnya adalah lulusan universitas yang terpaksa menerima hidup dengan pekerjaan kasar tersebut (sebagai pedagang kaki lima/PKL) Ibu dari Mohammed Bouazizi mengatakan bahwa aksi bakar diri tersebut bukan karena faktor ideologi atau politik. Aksi tersebut murni demi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut ibu Bouazizi, merupakan sebuah kehinaan bagi anaknya bahwa dia menderita (dimaki dan disiksa oleh aparat) yang tidak lagi dapat dia toleransi. Aksi bakar diri yang dilakukan oleh Bouazizi merupakan

⁵ Op cit hlm.120

⁶ Ibid hlm. 120

pilihan hidup terbaik baginya yang tidak lagi punya harapan hidup serta tidak tahan menghadapi hidup yang hampir setiap hari diperlakukan sewenang-wenang dan dihina oleh aparat.

Bouazizi sempat dilarikan ke rumah sakit setelah membakar dirinya dan juga sempat dipindahkan ke rumah sakit kota Ben Arous, dekat Tunis. Di sana ia menjalani perawatan di Trauma Centre dan Burn. Presiden Tunisia, Zein al-Abidin Ben Ali, sempat menjenguknya di rumah sakit. Namun semua sudah terlambat dan tidak mampu menyelamatkan nyawa pedagang kaki lima tersebut serta menyelamatkan kekuasaan Ben Ali. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2011 atau 17 hari telah aksinya tersebut, Bouazizi menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari itu, kurang lebih 5.000 orang ikut ambil bagian dalam proses pemakamannya. Keesokan harinya, Bouazizi dimakamkan di pemakaman Bennour Garat, 10 mil dari Sidi Bouzid.

Kemarahan publik tidak hanya meluas setelah Bouazizi meninggal, tetapi hanya sehari berselang ia membakar dirinya massa kemudian turun melakukan unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut. Aparat sempat kewalahan mengatasi kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Youtube* menyorot beberapa gambar dari aksi tersebut. Dalam upayanya untuk memadamkan kerusuhan, Presiden Ben Ali mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal. Namun kunjungan Ben Ali tidak berhasil memadamkan semangat perlawanan dari rakyatnya.

Setelah kematian Bouazizi, gerakan perlawanan terus terjadi hingga kekerasan meningkat terus menerus, bahkan semakin mendekati ibukota negara, Tunis. Pada tanggal 27 Desember 2010, lebih dari 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintahan. Pada saat yang sama, 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintahan istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Desember 2010.

Pada tanggal 30 Desember 2010, aparat membubarkan demonstrasi damai di Monastir dengan menggunakan kekerasan. Hal ini dilakukan juga di Sbikha dan Cebba. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 31 Desember 2010, ketika pertemuan umum diselenggarakan oleh pengacara di Tunisia dan kota-kota lainnya. Demonstrasi juga dilanjutkan karena adanya seruan dari Kelompok Pengacara Nasional Tunisia, Mokhtar Trifi, selaku Presiden Liga Hak Asasi Manusia Tunisia atau dikenal dengan *Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme* (LTDH). Trifi mengatakan bahwa pengacara di Tunisia telah secara kejam dianiaya dan dipukuli.

Tanggal 3 Januari 2011 demonstrasi dilakukan dekat kota Thala dengan mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup, namun akhirnya demonstrasi tersebut berubah menjadi anarkis. Demonstrasi yang diikuti kurang lebih 250 orang tersebut diikuti sebagian besar mahasiswa sebagai upaya untuk mendukung aksi para demonstran di Sidi Bouzid. Sebagai responsnya, para pengunjuk rasa dilaporkan telah membakar ban dan menyerang kantor RCD atau *Rassemblement Constituonnel Democratique*. RCD adalah partai pendukung Ben Ali dan menjadi partai dominan dalam pemerintahan. Menanggapi aksi

demonstrasi yang berujung kerusuhan, aparat mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan para demonstran karena merusak bangunan, membakar ban, membakar sebuah bus, dan membakar dua mobil kelas pekerja pinggiran dari Ettadhame-Mnihla di Tunis. Aparat militer juga dikerahkan di banyak kota di seluruh wilayah Tunisia.⁷

Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi protes massa tersebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk pemberitaan masif dari *Al-Jazeera* yang diambil langsung oleh masyarakat Tunisia, melalui kamera telepon seluler dan kemudian disebarakan melalui *YouTube* dan *Facebook* dan kemudian disebarakan lagi melalui *Twitter*, bahkan kabel pemberitaan *Wikileaks*.⁸ Peran media yang memberitakan kekejaman aparat rezim di bawah rezim Ben Ali tersebutlah yang menjadi faktor penting dan utama bangkitnya gerakan massa untuk menggulingkan Ben Ali yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparaturnegara.

Gerakan sipil (*people power*) yang muncul untuk melawan kendali negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak Tunisia merdeka pada tahun 1956. Menanggapi bangkitnya kekuatan sipil itulah sehingga Ben Ali menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan darurat dan dia juga bernjanji untuk mengadakan pemilihan legislatif baru dalam waktu enam bulan.⁹ Ben Ali juga mengatakan akan menurunkan harga pangan, menjamin kebebasan politik, media massa, dan berjanji akan mundur dari jabatan presiden pada tahun 2014. Saat itu, Ben Ali mengatakan kepada rakyatnya untuk menciptakan sekitar 300.000 lapangan

⁷ Apriadi Tamburaka, 2011, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, hlm 25-31

⁸ Eric Goldstein, 2011, *Revolution in Arab World*, Washington Foreign Policy hlm. 69

⁹ Op cit hlm. 33

pekerjaan dalam jangka waktu dua tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Janji yang diucapkan oleh Ben Ali tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk meredam kemarahan publik terhadap rezim otoritarian yang dia bangun sejak menggulingkan Bourguiba pada tanggal 7 November 1987. Namun demikian, upaya politik yang dilakukan oleh Ben Ali, termasuk dengan mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal, tidak membuahkan hasil. Demonstrasi terus berlangsung di seluruh negeri, bahkan beberapa tokoh yang selama ini menjadi bagian dari rezim tidak mematuhi perintah Ben Ali .

Era kekuasaan Ben Ali yang dibangun dengan tangan besi berakhir setelah menyatakan mundur dari kursi kekuasaannya sebagai Presiden Tunisia pada tanggal 14 Januari 2011, sekitar pukul 16.00 waktu setempat di mana pernyataannya didelegasikan kepada Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk bertindak sebagai kepala negara “sementara” selama ketidakhadirannya. Ben Ali dan keluarganya melarikan diri ke Arab Saudi untuk menghindari tuntutan massa yang berhasil mengakhiri 23 tahun masa kejayaan kekuasaannya.

Keputusan Ben Ali untuk mundur dan meninggalkan Tunisia secepatnya karena dua faktor. Pertama, gerakan massa di seluruh negeri semakin kuat yang tidak lagi mampu dikendalikan oleh aparaturnya. Para demonstran, yang pada awalnya turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya Bouazizi, selanjutnya menuntut pemecatan kepala aparat setempat Khaled Ghazouani di Kef. Ben Ali tentu menyadari bahwa kekuatan massa yang semakin besar melawan rezimnya akan berujung pada tuntutan pengunduran dirinya dari kursi

kepresidenan dan kemudian dia akan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan atas meninggalnya beberapa demonstran.

Kedua, dukungan Barat tidak datang pada masa krisis di mana dia sedang membutuhkannya. Bahkan Perancis tidak bersedia memberinya suaka politik sehingga Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi. Presiden Barak Obama menyambut positif gerakan protes para demonstran. Tidak adanya dukungan Barat, terutama Amerika, yang dibutuhkan oleh Ben Ali karena Tunisia bukanlah negara yang menjaga kepentingan utama bagi Washington. Tunisia bagi Washington dan sekutunya adalah sebuah *peripheral interest*. Tunisia tidak mempunyai suplai minyak yang banyak dan juga tidak ada gerakan Islam, yang menjadi ketakutan Washington. Ekspor Tunisia juga lebih banyak ke pasar Eropa bukan ke Amerika. Ekspor Tunisia ke pasar Eropa mencapai 71% dari total ekspor yang dilakukan Tunisia.¹⁰

Presiden Ben Ali akhirnya mundur dari jabatannya pada 14 Januari 2011 kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Tunisia yaitu Mohamed Ghannouchi. Tunisia kemudian melaksanakan pemilihan umum untuk *National Constituent Assembly* pada 23 Oktober 2011. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh *Ennahda*, partai Islam moderat dengan perolehan suara 37% dari pemilih. *National Constituent Assembly* bertugas melakukan pembaruan konstitusi

¹⁰ Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 122-123, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

negara. Konstitusi yang berlaku di Tunisia sebelumnya adalah konstitusi 1959 yang belum pernah diperbarui.¹¹

Tumbangnya rezim kuat Ben Ali di Tunisia oleh gerakan kekuatan massa (*people power*), menjadi sorotan media di seluruh dunia. Hal tersebut menyebarkan efek domino terhadap negara-negara lain di Timur Tengah. Efek domino tersebut karena faktor-faktor yang menjatuhkan rezim Ben Ali juga terdapat di negara Timur Tengah lainnya. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada banyak negara Timur Tengah lebih parah jika dibandingkan dengan Tunisia. Sebagian besar negara-negara Timur Tengah masih otoriter atau anti-demokrasi. Hal ini menjadi awal lahirnya perubahan di negara-negara tersebut. Berakhirnya era kekuasaan Ben Ali tersebar dan menjadi berita hangat di berbagai wilayah Timur Tengah, bahkan dunia. Perlawanan rakyat Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim diktator Ben Ali menjadi inspirasi bagi masyarakat negara-negara Timur Tengah lainnya untuk membangun kekuatan gerakan massa melawan rezim yang diktator.

Setelah tergulingnya rezim Ben Ali di Tunisia, *Arab Spring* menjalar ke Mesir. Rakyat Mesir menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak yang dinilai otoriter, korup, dan gagal membangun selama 30 tahun kekuasaannya. Rakyat Mesir menilai pemerintahan Mubarak sudah terlalu lama dan saatnya untuk diganti dengan pemimpin yang baru. Dukungan rakyat terhadap pemerintahan Mubarak sudah turun drastis karena kemiskinan dan pengangguran

¹¹ Erzebet, N. Rosza, dkk, 2012, *The Arab Spring: Its Impact On the Region and On Middle East Conference*, Policy Brief for for the Middle East Conference On A WMD/DV's FreeZone No 9/10 Agustus 2012, Academic Peace Orchestra Middle East hlm. 4 <http://library.fes.de/pdf-files/iez/09609.pdf> diakses pada 2 Februari 2017

yang merebak luas. Harga-harga melambung tinggi, sementara daya beli semakin merosot. Sekitar 50% dari 81 juta penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2010.¹² Rezim otoriter Mubarak mebatasi kebebasan politik, terutama kelompok oposisi.¹³

Gerakan rakyat di Mesir memiliki kesamaan dengan gerakan rakyat di Tunisia. Gerakan ini tidak digerakkan oleh tokoh khusus, tetapi benar-benar dituntun oleh media sosial, seperti layanan pesan khusus melalui telepon seluler, Facebook, dan Twitter. Gerakan rakyat di Mesir dipicu karena seorang pemuda Mesir bernama Khaled Said yang meninggal dunia akibat penyiksaan oleh intelijen Mesir. Khaled Said dianiaya oleh polisi karena mengunggah sebuah video yang berisi pegawai yang sedang bertransaksi mengedarkan narkoba.¹⁴ Khaled Said adalah seorang pengusaha di Alexandria, Mesir. Revolusi di Mesir dipelopori para pemuda yang saling terkoneksi di dunia maya. Seorang pemuda bernama Wa'el Ghoneim membuat akun Facebook dengan nama *We are all Khaled Said*, pada Juni 2010, hal tersebut bertujuan untuk mengecam pembunuhan Khaled Said. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Mesir Hosni Mubarak merasa semakin terancam dengan bersatunya jutaan kekuatan rakyat menuntut dirinya mundur.

¹² Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm.123 <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

¹³ Erzebet, N. Rosza, dkk, 2012, *The Arab Spring: Its Impact On the Region and On Middle East Conference*, Policy Brief for for the Middle East Conference On A WMD/DV's FreeZone No 9/10 Agustus 2012, Academic Peace Orchestra Middle East hlm. 4 <http://library.fes.de/pdf-files/iez/09609.pdf> diakses pada 2 Februari 2017

¹⁴ BBC, 2014, Egypt Polices Jailed Over 2010 Death of Khaled Said, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26416964> diakses pada 18 Mei 2017

Khawatir akan aksi massa, otoritas berwenang pada 28 Januari 2011 menutup layanan internet dan telepon seluler serta mengerahkan pasukan *elite* bersenjata lengkap, termasuk tank dan mobil anti huru-hara. Satu hari sebelumnya, pemerintah sudah menutup akses jejaring sosial *Twitter* dan *Facebook*, juga *Youtube*, *Yahoo*, dan *Google*. Empat operator utama penyedia layanan internet di Mesir, yaitu *Link Mesir*, *Vodafone*, *Raya Telecom Mesir*, dan *Etisalat Misr* mengaku layanan mereka telah ditutup pemerintah. Warga Mesir turun ke jalan sejak tanggal 25 Januari 2011. Pada 11 Februari 2011, Wakil Presiden Omar Suleiman, melalui televisi, memberitahukan kepada seluruh warga Mesir bahwa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Revolusi rakyat Mesir pada saat itu mempunyai obsesi membangun sistem demokrasi di negaranya.¹⁵

Aksi protes seanjutnya menjalar ke Libya yang dimulai pada 15 Februari 2011. Rakyat Libya menuntut mundurnya Presiden Moammar Ghadafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Presiden moammar Ghadafi dituntut mundur karena dituduh melakukan nepotisme dan korupsi. Selain itu Ghadafi juga mendominasi pemerintahan dan melakukan pelanggaran HAM. Kondisi Libya diperparah dengan banyaknya pengangguran dan kebebasan rakyat yang dibatasi.¹⁶

Aksi demonstrasi di Libya yang berlangsung di Beghazi mendapat respon keras dari pemerintahan Ghadafi. Mereka menganggap aksi tersebut

¹⁵ Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional Vol.4 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm.123 <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

¹⁶ Age Juhdi Alfani, 2016, *Transisi Demokrasi di Libya Tahun 2011-2014*, Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75997> di akses pada 10 Oktober 2017

membahayakan negara sehingga mereka menurunkan pasukan militer dan mengerahkan senjata untuk menghentikan demonstrasi. Akibatnya banyak warga sipil yang menjadi korban kerusuhan. Selain itu mereka juga menangkap seorang aktivis HAM Libya, yaitu Fathi Terbil. Ditangkapnya Fathi Terbil emkin membakar semangat rakyat untuk menurunkan Ghadafi dari jabatannya. Demonstrasi kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya di Libya seperti Tripoli, Zawiyah, dan Misrata. Seperti pada demonstrasi sebelumnya, Ghadafi tetap menurunkan pasukan militernya untuk membubarkan aksi demonstrasi Aksi represif Ghadafi mendapat kecaman dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Pemerintahan Ghadafi dianggap telah melanggar HAM karena banyaknya korban luka dan tewas yang berjatuhan pada demonstrasi yang menuntut dirinya mundur.

Legitimasi pemerintahan Ghadafi semakin menurun. Kondisi politik dalam negeri Libya menjadi tidak stabil. Menanggapi hal tersebut, kelompok oposisi mengadakan pertemuan pada 24 Februari 201 di Bayda. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi dari krisis yang terjadi. Pertemuan kelompok oposisi ini dipimpin oleh Mustafa Abdel Jalil, mantan Mneteri Kehakiman era Ghadafi. Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya *National Transition Council* (NTC) yang bertujuan mengkoordinir pemberontakan yang terjadi di berbagai kota di Libya untuk menurunkan Ghadafi. NTC terbentuk pada 27 Februari 2011.

Pada 5 Maret 2011 NTC mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan yang sah mewakili rakyat Libya dan negara Libya. Pendeklarasian ini bertujuan untuk menarik simpati internasional dan NTC berkeinginan campur tangan pihak asing untuk mengatasi konflik di Libya. Intervensi kemudian datang dari Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). PBB mengintervensi Libya dengan mengeluarkan larangan zona terbang di Libya. Keberhasilan NTC menarik perhatian pihak asing, menjadikan posisi NTC semakin kuat. NTC bersama NATO berupaya melumpuhkan kekuatan pasukan Ghadafi di berbagai kota di Libya. Pada 20 Oktober 2011 dengan bantuan NATO, NTC berhasil membunuh Ghadafi di kota Sirte. Terbunuhnya Ghadafi menjadi tanda berakhirnya rezim otoriter Ghadafi. Transisi demokrasi di Libya selanjutnya dipimpin oleh NTC.

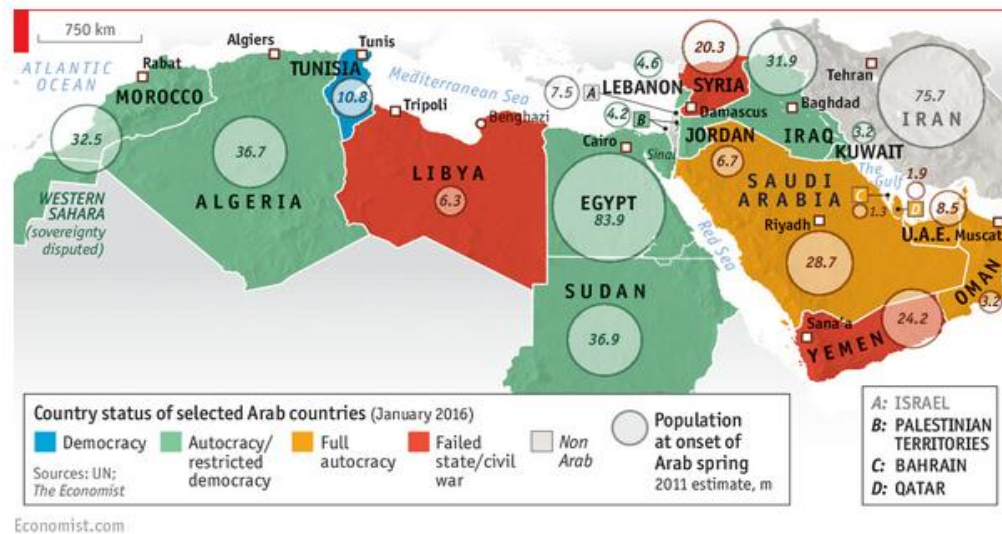
Selama periode kerusuhan regional ini, beberapa pemimpin negara mengumumkan keinginannya untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah masa jabatannya berakhir. Presiden Sudan Omar al-Bashir mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada 2015, begitu pula Perdana Menteri Irak Nouri Al-Maliki, yang masa jabatannya berakhir tahun 2014. Meski unjuk rasa semakin menjadi-jadi menuntut pengunduran dirinya sesegera mungkin. Protes di Yordania juga mengakibatkan pengunduran diri pemerintah. Mantan Perdana Menteri dan Duta Besar Yordania untuk Israel Marouf al-Bakhit ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Raja Abdullah. Mereka ditugaskan membentuk pemerintahan baru.

Demonstrasi menuntut pemerintah untuk mundur juga terjadi Yaman, Bahrain dan Suriah. Di Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah menjabat selama hampir 30 tahun dan dinilai tidak berhasil dalam menyejahterakan rakyatnya, menjadikan rakyat Yaman bangkit dan tergerak untuk melakukan aksi kudeta terhadap Presiden Yaman. Rakyat Yaman menuntut adanya perubahan pada konstitusi negara. Rakyat juga memprotes tingginya angka pengangguran, korupsi

dan kemiskinan. Rakyat Yaman berhasil mennggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh pada April 2011 dengan bantuan dari kelompok Houthi yang berbasis di Yaman Utara. Demonstrasi di Bahrain diwarnai dengan kekerasan dan intervensi negara lain. Aksi demonstrasi di Bahrain di intervensi oleh Arab Saudi melalui *Gulf Cooperation Council* (GCC). Demonstrasi di Suriah juga diwarnai dengan kekerasan. Bashar Al-Assad menolak mundur dan mencoba melakukan negosiasi namun gagal dan berakhir dengan konflik yang berkepanjangan.

Arab Spring telah memunculkan konflik-konflik baru di negara-negara Timur Tengah. Berbagai kelompok kepentingan berusaha memperebutkan kursi kekuasaan yang kosong setelah tergulingnya rezim. Gelombang unjuk rasa yang terjadi juga tidak semua menemukan jalan kesuksesan. Hal ini kemudian memunculkan ketidakstabilan di negara-negara yang menemui jalan buntu.

Negara-negara yang mengalami transisi dan telah berhasil menyelenggarakan pemilu selanjutnya dihadapkan pada masalah menciptakan kestabilan politik dalam negaranya. Selain menciptakan kestabilan politik, negara juga harus mampu membangun konsolidasi demokrasi yang akan membawa negara pada kondisi demokrasi yang ideal. Pasca transisi, yang terjadi di Timur Tengah adalah perebutan kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan. Hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan dan berujung kekerasan yang menimbulkan konflik baru di beberapa negara. Pada Januari 2016 *The Economist* melansir sebuah data yang menyatakan kondisi negara-negara di Timur Tengah lima tahun setelah terjadinya *Arab Spring*.



Gambar 1. Peta kondisi negara-negara Timur Tengah pasca Arab Spring
sumber: *The Economist.com*

Gambar di atas menunjukkan kondisi negara-negara di kawasan Timur Tengah saat ini. Tunisia menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang menggunakan sistem demokrasi. Sementara Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain masih menerapkan sistem autokrasi secara penuh. Di Libya, Suriah dan Yaman masih terdapat perang sipil atau dinyatakan sebagai negara gagal. Sementara negara-negara lainnya menerapkan sistem demokrasi terbatas atau autokrasi.

Keberhasilan Tunisia menerapkan demokrasi, menjadi angin segar di Timur Tengah. Samuel Huntington mengemukakan ada tiga penghambat menuju demokrasi, yaitu politik, ekonomi dan budaya. Dalam penjelasannya Huntington mengatakan bahwa faktor budaya merupakan penghambat bagi demokrasi di Timur Tengah. Islam yang mendominasi di Timur Tengah dianggap menjadi penghambat bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. namun, hal ini tidak terjadi di Tunisia. Hal tersebut tercermin dari terpilihnya partai *Ennahda* yang

beraliran Islamis. Proses transisi seperti apakah yang terjadi di Tunisia sehingga Tunisia dikatakan berhasil menerapkan demokrasi pasca Arab Spring menjadi fokus dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu “**Bagaimana proses transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring?**”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengangkat dua tujuan yang akan menjadi landasan analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dua tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses transisi demokrasi yang terjadi di Tunisia pasca *Arab Spring*
2. Mengidentifikasi jenis transisi di Tunisia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menghasilkan beberapa manfaat, baik untuk keilmuan dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi pengetahuan tambahan dan memperkaya pengetahuan untuk kajian demokrasi di negara-negara Timur Tengah, terutama Tunisia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi dan data penting bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengangkat tema penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum mengenai transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mengulas beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya sebagai landasan awal dalam membangun kerangka pemikiran pada penelitian ini. Peneliti akan mengulas beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Karya ilmiah yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sahide yang berjudul "*The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*". Ahmad Sahide menjelaskan secara detail kronologi awal terjadinya *Arab Spring*. Namun, ia hanya menjelaskan fenomena *Arab Spring* di tiga negara, yaitu Tunisia, Mesir dan Suriah. Dalam analisisnya Ahmad menggunakan teori Perubahan Sosial.¹⁷

Dalam tulisannya, Ahmad Sahide menjelaskan bahwa fenomena *Arab Spring* di Tunisia bermula dari aksi bakar diri yang dilakukan oleh seorang pemuda 26 tahun, Mohammed Bouazizi, melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang menarik perhatian seluruh negeri, bahkan dunia, pada tanggal 17 Desember 2010.

¹⁷ Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring : Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 120, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

Aksi bakar diri (*self-immolation*) yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas, melalui pemberitaan di media sosial, media-media nasional dan internasional, yang diikuti oleh demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter di negara-negara Arab, bukan hanya di Tunisia.

Sebelum Arab *Spring* berkejolak, ketiga negara Arab tersebut (Tunisia, Mesir, dan Suriah) mempunyai beberapa kesamaan kondisi sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi Arab *Spring* berkejolak. Pertama, ketiga negara tersebut masing-masing dipimpin oleh pemimpin otoriter yang berkuasa cukup lama serta pemimpin yang meraih kekuasaan dengan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Kedua, ketiga negara tersebut membangun rezim politik dengan sistem satu partai. Ketiga, negara-negara tersebut mempunyai banyak catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta membatasi ruang berekspresi kepada rakyatnya, termasuk dengan tidak adanya kebebasan pers. Keempat, krisis ekonomi dan pengangguran melanda rakyat yang dipimpinnya serta meningkatnya tingkat pengangguran.¹⁸

Ahmad Sahide mengambil kesimpulan bahwa Arab *Spring* yang berkejolak sejak awal 2011 lalu menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik. Peristiwa politik penting di negara-negara Arab tersebut terjadi karena banyak faktor yang terlibat memengaruhi, yaitu peran kelompok-kelompok intelektual, baik itu di Tunisia, Mesir, dan Suriah, serta pengaruh dari media sosial. Selain itu, efektifnya peran kedua faktor tersebut juga didukung dengan situasi sosial ekonomi dari ketiga negara tersebut memiliki

¹⁸ *ibid*

tingkat pengangguran dan buta huruf cukup tinggi. Hal lainnya yang terjadi dari ketiga negara tersebut adalah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara (rezim). Jurnal ini peneliti gunakan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab Arab *Spring* yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Suriah

Karya ilmiah yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Sidik Jatmika yang berjudul “*Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*”. Dalam tulisannya Sidik menjelaskan bahwa Timur Tengah pernah menjalani proses demokratisasi pada gelombang pertama dan ketiga. Pada gelombang pertama di kawasan Timur Tengah lahir beberapa pemerintahan baru maupun negara-nasional baru, seperti Republik Syria, Libanon dan Republik Arab Mesir. Pada gelombang ketiga, terjadi revolusi di Iran pada tahun 1979.¹⁹

Sidik lebih banyak menjelaskan kejatuhan presiden Libya, Moanmar Khadafy dibandingkan negara-negara yang mengalami gejolak Arab *Spring* lainnya. Sidik juga memaparkan krisis-krisis yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2010. Jatuhnya rezim seperti di Tunisia, Mesir, dan Libya, disusul oleh pemberontakan mencerminkan krisis legitimasi dan lemahnya otoritas para pemimpin politik di wilayah tersebut. Fakta menunjukkan bahwa para penguasa di Timur Tengah pada umumnya memiliki berbagai krisis politik, antara lain krisis otoritas, ekuualitas dan kontinuitas Selain itu, kesetiaan banyak orang di Negara Arab terhadap pemimpinnya menjadi situasi yang sulit ketika harus berhadapan dengan afiliasi

¹⁹Sidik Jatmika, 2013, *The Arab spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 161 <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/343/391> diakses pada 18 18 Desember 2016

seperti *ashabiyah*, *wathanniyah*, *qaummiyah* and *ummah*. Jurnal ini memberikan informasi dinamika politik yang ada di Timur Tengah.

Karya ilmiah yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Indriana Kartini yang berjudul “*Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam Masa Transisi Demokrasi*”. Indriana dalam analisisnya menggunakan paradigma transisi menurut O’Donnel & Shmitter terdiri dari tiga tahapan yakni liberalisasi, transisi, dan konsolidasi. Empat negara Arab yang dianalisis adalah Tunisia, Libya, Mesir dan Suriah. Empat negara tersebut dikatakan gagal karena tidak mencapai fase konsolidasi.²⁰

Indriana menjelaskan kondisi empat negara Arab tersebut dari segi politik pasca diruntuhkannya rezim pada gejolak Arab *Spring*. Tunisia yang berhasil membuat konstitusi baru dan berhasil menyelenggarakan pemilu, namun mengalami ketidakstabilan dua tahun setelah terlaksananya pemilu. Hal ini kemudian menyebabkan turunnya kepercayaan rakyat Tunisia pada demokrasi. Mesir setelah peristiwa Arab *Uprising* dalam proses transisi politiknya dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis mengalami kudeta militer. Suriah dan Libya jatuh dalam perang saudara berkepanjangan pasca pemberontakan. Suriah jatuh ke dalam perang multilateral serta krisis kemanusiaan akibat tindakan pemerintah yang secara sistemik menggunakan kekerasan ekstrim terhadap demonstran pada tahun 2011. Libya saat ini termasuk ke dalam kategori negara gagal setelah jatuhnya rezim Khadafi. Hal ini dilihat dari cara perubahan rezim direalisasikan, dan aksi para politisi dan

²⁰ Indirana Kartini, 2015, *Keagagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam Masa Transisi Demokrasi*, Jurnal Hubungan Internasional Tahun VIII, No.2, Juli - Desember 2015, Universitas Airlangga

pemimpin milisi Libya. Setelah pembunuhan terhadap dirinya, Khadafi mewariskan kepada rakyat Libya sebuah negara yang tidak berfungsi dengan institusi pemerintahan yang lemah dan sedikit bahkan ketiadaan masyarakat sosial.²¹

Indriana menyimpulkan transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir belum bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan, namun setidaknya kedua negara tersebut telah melakukan proses pembentukan pemerintahan yang stabil. Lebih lanjut, Tunisia dan Mesir saat ini merepresentasikan transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis, meskipun terjadi penurunan komitmen terhadap demokrasi. Dibandingkan Mesir yang mengalami kemunduran demokrasi akibat kudeta militer sehingga membawa Mesir kembali ke rezim otoritarian, Indonesia mampu mencegah kembalinya rezim otoritarian. Indirana memberikan lebih banyak data mengenai Tunisia.

Karya ilmiah yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Sugito, yang berjudul *“Liga Arab dan Demokratisasi di Dunia Arab”*. Dalam jurnal ini, Sugito melakukan tinjauan teoritis tentang apa yang disebut demokrasi. Sugito menggabungkan beberapa pemikiran para ahli seperti Robert A. Dahl, G. Bingham Powell Jr., dan Charles. F. Andrain. Sugito juga mengutip dari Samuel P. Huntington mengenai modernisasi yang menyebabkan *the King’s Dilemma* yang melanda negara monarkhi. Disatu sisi, kekuasaan yang sangat sentralistik diperlukan untuk menjalankan pembaruan-pembaruan sosial, budaya, dan ekonomi, namun disisi lain sentralisasi tersebut telah mempersulit atau bahkan tidak mungkin bagi kerajaan tradisional untuk memperluas basis kekuasaannya

²¹ ibid

dan menerima kekuasaan kelompok baru yang dihasilkan oleh modernisasi. Hal tersebut yang melanda dunia Arab sekarang ini.²²

Permasalahan demokrasi juga dialami oleh negara-negara Republik Arab, yaitu Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, dan Palestina. Apabila di negara-negara monarkhi, penguasa berupaya untuk mempertahankan dan mencari legitimasi dengan mempertahankan pola tradisional dan menghubungkannya dengan modernitas, maka para pemimpin di negara-negara Republik berupaya untuk mempertahankan dan mencari legitimasi dari sumber-sumber modern dan menghubungkannya dengan pola-pola otoritas tradisional. Ada kecenderungan bahwa para pemimpin negara-negara republik yang revolusioner untuk bersikap otoriter. Hal ini dilakukan untuk meredam sentimen etnisitas yang sering memunculkan konflik horisontal bahkan vertikal. Upaya-upaya penguasa untuk mengkaitkan antara masa saat ini (modern) dengan masa lampau nampak dalam pengakomodasian kelompok-kelompok etnis atau agama yang ada dalam satu negara ke dalam lembaga politik.²³

Liga Arab lebih sering menampilkan dirinya sebagai sarana bagi negara-negara anggotanya untuk melaksanakan politik luar negerinya. Dalam pengertian ini, negara-negara anggotanya lebih sering memanfaatkan Liga untuk mendesak kepentingannya agar menjadi keputusan bersama dan menarik diri dari keputusan jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingannya. Dalam Liga Arab terdapat beberapa isu yang diusung salah satunya adalah agenda reformasi dimana demokratisasi terdapat didalamnya. Dalam kasus ini, sikap negara-negara

²² Sugito, 2012, *Liga Arab dan Demokratisasi di Dunia Arab* Jurnal Hubungan Internasional Vol.1 No.2 Oktober 2012, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²³ ibid

monarkhi akan selalu menentang adanya demokratisasi, karena pengorganisasian negara yang masih mendasarkan legitimasi kekuasaan berdasarkan pada ikatan-ikatan tradisional terutama keturunan dan agama. Bagi negara-negara republik yang cenderung revolusioner dan sosialis, demokratisasi juga dipandang sebagai ancaman yang akan mengganggu kekuasaannya. Pemerintahan yang cenderung otoriter dengan kekuasaan yang ditopang oleh faktor karisma, Partai yang bercorak Sosialis, dan militer yang kuat, akan sangat rentan dengan isu demokratisasi dimana disyaratkan adanya penguatan peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.²⁴

Sugito menyimpulkan, Liga Arab tidak bisa berbuat lebih baik ketika berhadapan permasalahan politik termasuk didalamnya isu demokratisasi. Dengan kewenangan terbatas yang diberikan oleh negara-negara anggota, Liga Arab tidak lebih sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan nasional dari pada kepentingan kolektif dunia Arab. Dalam posisi yang demikian, Liga menjadi lemah untuk menghasilkan keputusan yang bulat dan mengikat bagi anggotanya. Jurnal ini memberikan analisis kemungkinan perwujudan demokrasi di Timur Tengah dan memaparkan fungsi Liga Arab yang berjalan tak semestinya.

Dari keempat penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa fenomena Arab *Spring* murni muncul dari internal negara. Tidak ada intervensi asing dalam meluapnya fenomena ini. Demokratisasi juga telah muncul dari sejak lama, namun terhambat karena faktor politik dan budaya. Arab *Spring* telah membuka pintu gerbang demokrasi di Timur Tengah. Penelitian ini akan menggunakan

²⁴ ibid

keempat penelitian terdahulu di atas sebagai referensi dan sumber data dalam penelitian.

B. Landasan Teori

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi banyak dipahami sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari filsuf Yunani, namun pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18.²⁵ Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Rumusan modern terpenting dari konsep demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Schumpeter dalam bukunya berjudul "*Capitalism, Socialism and Democracy*" yang terbit tahun 1942 menyanggah teori demokrasi klasik dengan menyatakan secara rinci kekuarangan teori demokrasi klasik serta mengemukakan teori lain mengenai demokrasi.²⁶ Menurut Schumpeter, yang oleh teorisasi klasik disebut kehendak rakyat sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggerakannya. Dengan demikian, berbeda dengan klasik, Schumpeter lebih menekankan pada

²⁵ Samuel P. Huntington 2001, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti, hlm. 4

²⁶ Ibid hlm.5

prosedur atau metode demokrasi. Sehingga, konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, dekriptif, institusional dan prosedural. Karena menekankan prosedural maka konsep demokrasi Schumpeter disebut juga demokrasi prosedural.²⁷

Schumpeter mendefinisikan metode demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.²⁸ Konsep Schumpeter mendominasi teorisasi mengenai demokrasi sejak tahun 1970-an, serta mewarnai pemikiran ilmuwan politik seperti Di Palma, Robert Dahl, Przeworski, Samuel P. Huntington, sampai dengan ilmuwan transitologis Diamond, Linz dan Lipset.

Samuel P. Huntington mendefinisikan demokrasi dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu: definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan definisi minimal. Pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil adalah esensi demokrasi, suatu *sine quo nom* yang tidak dapat dielakkan. Kriteria yang kedua adalah adanya pembatasan kekuasaan. Dalam negara demokrasi para pembuat keputusan terpilih tidak menjalankan seluruh kekuasaan. Mereka berbagi kekuasaan dengan kelompok lain dalam masyarakat. Ketiga, adanya stabilitas terhadap sistem demokrasi. Keempat, adanya keadilan dalam pemilihan, pembatasan terhadap partai politik dan kebebasan pers. Terakhir, rezim-rezim

²⁷ *Teori Politik dan Ideologi Demokrasi*, Universitas Gadjah Mada, elisa.uqm.ac.id/user/archive/download/32057/1eca8113b2304776be65f882f93e9009 diakses pada 3 Maret 2017

²⁸ Samuel P. Huntington 2001, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta hlm. 5

nondemokratis tidak mengadakan kompetisi dalam pemilihan umum dan tidak memiliki tingkat partisipasi pemberian suara yang luas.²⁹

2. Transisi

Transisi adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim politik yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim otoritarian oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa suatu alternatif revolusioner.³⁰ Transisi merupakan peralihan sistem politik dari otoritarianisme menuju demokrasi, diawali dengan keruntuhan rezim otoriter, melalui liberalisasi politik dan berakhir dengan konsolidasi demokrasi.

Menurut Samuel P. Huntington, transisi dapat berjalan apabila kelompok pembaharu lebih kuat dari pada kelompok konservatif, jika pemerintah baru lebih kuat dari pada kelompok oposisi dan jika kelompok moderat lebih kuat daripada kelompok ekstremis-radikal. Dengan kata lain, transisi mensyaratkan pemerintah baru harus lebih kuat secara legitimasi daripada oposisi.³¹

Samuel P. Huntington merumuskan ada tiga jenis proses. Jenis pertama adalah transformasi (*reforma*) yang terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Jenis kedua berupa pergantian atau *replacement* (*ruptura*) terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Jenis ketiga adalah

²⁹ ibid hlm. 8-11

³⁰ Guillermo O'Donnell & Philippe C Schmitter, 1986, *Transitions from Authoritarian Rule*, London, John Hopkins University Press, hlm. 6

³¹ Op cit hlm. 158

transplacement (rupforma) terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.³²

Dalam jenis transformasi, pihak-pihak yang berkuasa pada rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim dan mengubahnya menjadi sistem yang demokratis. Transformasi mensyaratkan pemerintah harus lebih kuat daripada pihak oposisi. Transformasi terjadi di Brazil, Spanyol dan Hungaria.³³ Transformasi berkembang melalui lima fase utama, yaitu: munculnya kelompok pembaharu, memperoleh kekuasaan, adanya kegagalan liberalisasi, munculnya legitimasi untuk menaklukan kelompok konservatif dan yang terakhir adalah mengikutsertakan kelompok oposisi.³⁴

Pada jenis pergantian atau *replacement*, kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim tersebut. Unsur-unsur dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Kelompok yang dulunya merupakan kelompok oposisi kini berkuasa dan ketika kelompok-kelompok dalam pemerintahan yang baru saling berselisih mengenai hakikat rezim yang seharusnya mereka lembagakan, maka nonflik tersebut memasuki fase baru. Proses *replacement*, terdiri dari tiga fase, yaitu: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbanganya rezim dan perjuangan setelah tergulingnya rezim. *Replacement* jarang terjadi pada sistem satu partai dan

³² Ibid hlm. 146

³³ Ibid hlm. 158-159

³⁴ Ibid hlm. 162-176

rezim militer. *Replacement* lebih banyak terjadi pada sistem diktator perorangan.

35

Dalam *replacement*, tidak ada penekanan pada kesinambungan prosedur dan legitimasi ke masa lalu seperti yang terdapat dalam transformasi lembaga prosedur gagasan dan orang-orang yang ada hubungannya dengan rezim terdahulu dianggap telah tercemar sehingga yang ditekankan adalah pemutusan sama sekali hubungan dengan masa lalu. Mereka yang menggantikan penguasa otoriter mendasarkan pemerintahan mereka pada “legitimasi ke masa depan” sesuatu yang akan mereka wujudkan di masa datang dan kurangnya keterlibatan mereka atau hubungan mereka dengan rezim terdahulu. Selain itu, pemimpin yang kehilangan kekuasaannya melalui proses *replacement* biasanya mengalami nasib yang menyedihkan.

Pada *transplacements*, demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Adanya keseimbangan antara kelompok konservatif dan kelompok pembaharu dalam pemerintahan membuat pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim. Pemerintah harus didorong dan atau ditarik ke dalam perundingan formal. Atau informal dengan pihak oposisi. Di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal yang antidemokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah. Karena itu, mereka juga mempertimbangkan faedah perundingan.³⁶

³⁵ Ibid hlm. 180-181

³⁶ Ibid hlm. 191

Dalam *transplacements*, fase yang harus dilalui adalah sebagai berikut: pertama, pemerintah sibuk dengan proses liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. Kedua, pihak oposisi mengeksploitasi pelanggaran ini dan memanfaatkan melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka mampu menjatuhkan pemerintah. Ketiga, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasi kekuasaan politik. Keempat, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan yang seimbang dan mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan transisi yang disetujui kedua belah pihak. Dengan demikian, proses politik yang mengarah pada *transplacements*, sering ditandai oleh tarik-menarik antara pemogokan, protes dan demonstrasi di satu pihak dengan represi, pemenjaraan, tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang di lain pihak.³⁷

Huntington mencatat ada beberapa masalah transisi yang harus dihadapi dan dilakukan oleh pemerintahan demokrasi baru yang berkuasa, yakni memapankan konstitusi baru, mengadakan pemilu, menyingkirkan para pejabat orde lama, mencabut undang-undang kadaluwarsa dan bertentangan dengan HAM, mengubah lembaga otoriter, seperti polisi, pengadilan dan intelejen, mengembalikan aset negara, memperkecil keterlibatan militer di pemerintahan, menangani pelaku kejahatan di masa lalu. Selain itu, pemerintah baru juga akan

³⁷ Ibid hlm. 193

menghadapi masalah krusial lainnya, seperti pemberontakan, konflik komunal, kemiskinan, inflasi, dan hutang luar negeri.³⁸

Huntington juga memamparkan hambatan-hambatan menuju demokrasi. Ada tiga penghambat utama demokratisasi yaitu, politik, ekonomi dan budaya. Huntington berpendapat hambatan yang paling sulit untuk diruntuhkan adalah budaya. Hal ini terjadi di negara-negara Timur Tengah yang banyak dipengaruhi budaya Islam dan negara-negara Asia Timur yang menganut aliran konfusianisme. Faktor ekonomi dan politik saling berhubungan dalam menghambat terjadinya demokratisasi. Hal ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dan miskin seperti Asia dan Afrika.³⁹

C. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti mencoba menjelaskan masalah utama dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu menjelaskan proses transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring* dan mengidentifikasi tipe transisi yang terjadi di Tunisia. Penjelasan yang disusun dalam kerangka pikir ini akan merelevansikan teori dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Fenomena Arab *Spring* membawa Tunisia, Mesir, Libya, dan beberapa negara lain di Timur Tengah dalam suatu fase transisi baru setelah aksi demonstrasi besar-besaran menuntut adanya perubahan dalam pemerintahan. Tunisia sebagai

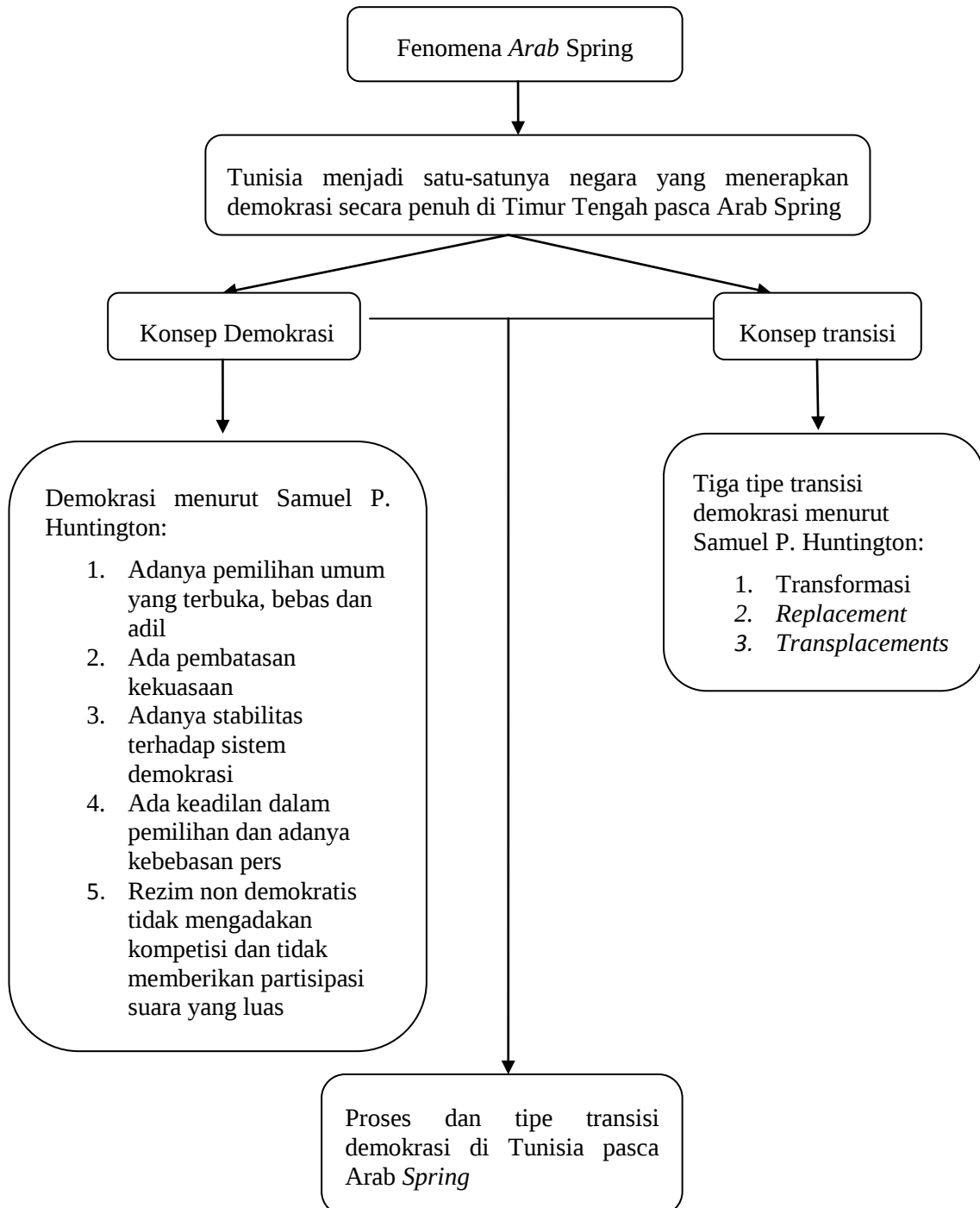
³⁸ Ibid hlm. 272-273

³⁹ Samuel P. Huntington, 1991, *Democracy's Third Wave*, Journal of Democracy Vol. 2 No.2 Spring 1991 hlm. 20-22 <http://www.ned.org/docs/Samuel-P-Huntington-Democracy-Third-Wave.pdf> diakses pada 10 Februari 2017

negara pertama yang mengalami gejolak Arab *Spring* mengaami keberhasilan setelah aksi bakar diri yang dilakukan Buoazizi mendapat sorotan berbagai media nasional hingga internasional. Rakyat Tunisia dengan memnfaatkan media sosial untuk menyerukan aksi demonstrasi dan menyebar informasi serta membangun jaringan komunikasi akhirnya berhasil menggulingkan Presiden Ben Ali yang telah berkuasa puluhan tahun. Keberhasilan Tunisia kemudian menjadi pemantik terhadap berbagai aksi demonstrasi di berbagai negara di Timur Tengah.

Ada tiga jenis transisi demokrasi yang dikemukakan oleh Huntington, yaitu: Transformasi, *Replacement*, dan *Transplacement*. Tranformasi terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. *Replacement* terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. *Transplacement (rupforma)* terjadi apabila transisi yang terjadi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell J., yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴⁰ Cresswell menambahkan bahwa kualitatif kebanyakan bercirikan informasi berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.⁴¹

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang sejarah, kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana pada metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Penelitian

⁴⁰ Somantri, Gumilar R. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*, hlm. 58
http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF_Revisi-ybs.pdf diakses pada 25 Maret 2017

⁴¹ Cresswell J., 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California, Sage Publication, hlm. 7

kualitatif memiliki beberapa tujuan, yaitu: memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang kompleks.⁴²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode dengan riset yang menggunakan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.⁴³ Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus digunakan untuk menjelaskan proses transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian yang akan menjadikan penelitian lebih terarah. Moleong menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif bagi peneliti. Hal itu ditujukan agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun.⁴⁴ Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis proses transisi demokrasi yang terjadi di Tunisia pasca Arab *Spring* dan mengidentifikasi tipe transisi yang terjadi di Tunisia pasca Arab *Spring*.

⁴² Pupu Saeful Rahmat, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium Vol.5 No.9 Januari-Juni 2009, hlm. 2 <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> diakses pada 31 Maret 2017

⁴³ Robert K. Yin, 2009, *Case Study Research: Design and Methods 4ed*. London: Sagem Publication. hlm. 7

⁴⁴ Sudarto 1995. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 63

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder adalah penelusuran dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, informasi dari website resmi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan demokrasi di Tunisia dan Arab *Spring*. Data ini kemudian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur atau kepustakaan. Studi literatur atau kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Data peneliti kumpulkan dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, portal berita online dan website resmi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti merujuk pada teknik analisis data yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman

memaparkan ada 3 tahap dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian (*display*) data dan penarikan kesimpulan.⁴⁵

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk aplikasi yang meragamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa agar dapat ditarik kesimpulan..

Setelah data direduksi data kemudian disajikan dengan uraian, tabel atau gambar. Dalam penyajian data peneliti menyajikan sejumlah asumsi, konsep, definisi dan proposisi. Sementara data dari kepustakaan yang didasarkan pada sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan berhasil dihimpun diolah serta dianalisis berdasarkan indikator variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah data disajikan dan dianalisis, peneliti menarik kesimpulan dari hasil hasil telaah pustaka dan analisis yang dilakukan.

⁴⁵ Miles.,Huberman. 1994, *Qualitative Data Analysis*, United Kingdom ,Sage Publications,. Hlm..9-11

IV. GAMBARAN UMUM

A. Politik dan Pemerintahan Tunisia Sebelum Arab Spring

Tunisia adalah sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika.. Tunisia menempati posisi geografis yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Nama resmi negara Tunisia adalah *Republic of Tunisia* atau *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*.⁴⁶ Tunisia adalah negara terkecil di Afrika Barat Laut. Tunisia adalah negara terkecil diantara tiga negara Tunisia, Aljazair, dan Maroko di wilayah yang disebut *Maghribi*. Dalam bahasa Arab, *maghribi* berarti “barat” daerah itu merupakan bagian paling barat dari dunia Arab. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di barat dan barat daya, Libya di tenggara, Laut Tengah di timur dan utara. Ibukota Tunisia adalah Tunis. Tunisia adalah salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim di belahan bumi bagian Afrika Utara. Bahasa resmi Tunisia adalah Bahasa Arab dan Perancis.

⁴⁶ *Profil Negara Republik Tunisia*, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia, <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx> diakses pada 20 Desember 2017



Gambar 3. Peta negara Tunisia

Tunisia berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebelum menjadi negara republik Tunisia sebelumnya merupakan negara monarki. Tunisia pernah dijajah oleh Perancis selama 75 tahun (1881-1956). Tunisia merdeka dari Perancis pada 20 Maret 1956. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan kabinet pelaksana pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden berhak menunjuk perdana menteri, anggota kabinet, gubernur, panglima angkatan bersenjata, kepala kepolisian dan hakim

agung. Lembaga legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan (*Chambre des Députés*). Ketua parlemen (*Chambre des Députés*) dipilih dari partai terbesar. Proses pemilihannya dilakukan setahun sekali, yaitu pada setiap pembukaan sidang parlemen pada bulan Oktober. Kekuasaan yudikatif dipimpin oleh sebuah lembaga yang bernama *Superior Council of Magistrature* atau Dewan Tertinggi Magistrasi yang diduduki oleh hakim-hakim agung. Fungsi kehakiman di Tunisia menjalankan dua jenis peradilan, yaitu peradilan umum (*Court of Accounts*) dan peradilan administratif (*Administrative Tribunal*), dan terdiri dari tiga level tingkatan berupa. *District Court*, *Court of Appeal* dan *Highest Court (Cour de Cassation)*.

Sebelum menjadi negara republik Tunisia merupakan bagian dari kerajaan Ottoman.⁴⁷ Tunisia mengalami kebangkrutan pada masa pemerintahan Dinasti Bey pada tahun 1868. Perancis, Britania dan Italia kemudian menawarkan bantuan finansial kepada pemerintahan Bey melalui Komisi Keuangan Internasional. Pada tahun 1878 Inggris menyetujui campur tangan Perancis kepada Tunisia dalam Kongres di Berlin. Perancis mulai memasuki Tunisia pada 6 April 1881 dan memutuskan untuk menanamkan pengaruhnya. Perancis dan pemerintah Tunisia melakukan pertemuan tanpa ada perlawanan dari rakyat Tunisia. Pertemuan antara pemerintah Tunisia dan Perancis menghasilkan perjanjian Bardo pada 12 Mei 1881. Perancis mengambil alih administrasi negara, keuangan, militer dan mengembangkan koloni walaupun pemerintahan Dinasti Bey di Tunisia masih berjalan.

⁴⁷ Dwi Wahyu Anggorowati, 2014, *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali di Tunisia tahun 2011*, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/22749/1/SKRIPSI.pdf> diakses pada 15 Desember 2017 hlm. 34-35

Tunisia dikuasai oleh Perancis selama 75 tahun yakni dari tahun 1881 hingga tahun 1956, sehingga rakyat Tunisia mulai menginginkan kebebasan. Sheikh al-Tha'libi, seorang pemimpin kaum muda Tunisia mendirikan Partai *Destour* tahun 1920. Partai *Destour* mempunyai tujuan untuk membebaskan Tunisia dari kolonialisasi Perancis. Partai *Destour* dinilai radikal oleh Perancis karena secara terang-terangan menentang Perancis. Hal ini mengakibatkan Sheikh al-Tha'libi diasingkan tahun 1923 hingga 1925 sehingga Partai *Destour* bubar

Perang Dunia II memang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kemerdekaan Tunisia. Tokoh-tokoh pergerakan Tunisia yang sebelumnya ditahan oleh pemerintahan protektorat Perancis dibebaskan oleh aliansi Jerman dan Italia yang menguasai Tunisia dari 1940-1943. Saat koalisi pimpinan AS mengusir aliansi Jerman dan Italia dari wilayah itu dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Perancis.

Tahun 1934 Habib Bourguiba membentuk partai Neo-*Destour* untuk meneruskan perjuangan pendahulunya, Partai *Destour*. Nasionalisme di Tunisia di bawah pimpinan Bourguiba telah semakin menguat. Kondisi tersebut membuat Perancis mereformulasi kebijakannya secara lebih terbuka dan semakin sensitif terhadap tuntutan rakyat Tunisia. Pada 27 Februari 1956 Habib datang ke Paris sebagai pemimpin delegasi Tunisia melakukan negosiasi bersama Perancis tentang kemerdekaan negaranya. Pada tanggal 20 Maret 1956, Perancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia dan mengembalikan pemerintahannya kepada Tunisia. Posisi perdana menteri yang dipegang Bourguiba kemudian berubah menjadi Presiden seiring dengan penghapusan sistem monarki dan Tunisia menjadi Negara Republik pada tanggal 25 Juli 1957. Undang-undang

Dasar Tunisia pun akhirnya terbentuk dan secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juni 1959.

Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi yang berisi 10 Bab dan 74 Pasal ini telah mengalami beberapa proses amandemen yang kesemuanya terjadi pasca lengsernya Buorquiba dari kursi kepresidenan. Amandemen pertama disahkan tanggal 12 Juli 1988, selanjutnya berturut-turut tanggal 29 Juni 1999, tanggal 1 Juni 2002, tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 28 Juli 2008. Amandemen terjadi pada masa Ben Ali.

Sebelum tahun 2002, badan legislatif Tunisia menganut sistem Uni-kameral, dimana 214 kursi anggota parlemen hanya diduduki oleh perwakilan dari partai politik yang ikut serta dalam Pemilu. Pada periode ini, jumlah kursi parlemen ditentukan oleh perolehan suara masing-masing partai. Namun, karena pada hampir setiap pemilu partai pemerintah selalu mendulang angka di atas 95%, pada tahun 1999 sebuah amandemen dikeluarkan untuk memberikan ruang bagi suara oposisi di parlemen. Setiap partai politik yang memenangkan pemilu memborong 75% (161) kursi parlemen. Sedangkan 25% (53) kursi sisa dibagikan kepada partai-partai peserta pemilu lainnya

Pada amandemen tahun 2002, konstitusi merubah wajah parlemen Tunisia menjadi bikameral. Selain anggota hasil pemilu, parlemen juga diduduki oleh “Dewan Penasehat” (*Chamber of Advisory, Majlis al-Shura*) yang berjumlah 126 orang dengan rincian 85 merupakan utusan daerah atau golongan serta 41 orang yang ditunjuk Presiden. Dewan Penasehat menjabat selama 6 tahun dengan pergantian setengah dari anggotanya dalam kurun waktu 3 tahun.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara tercantum secara eksplisit dalam teks pembukaan konstitusi (*Preamble*). Konsep *Liberte*, *Egalit* dan *Fraternite* terangkum dalam faham kemanusiaan, keadilan, persatuan, persaudaraan Arab *Maghreb*, serta pemisahan kekuasaan. Islam juga menjadi salah satu pilar negara dalam posisi yang sejajar dengan pilar-pilar lain yang disebutkan di atas.

Terdapat delapan partai politik yang diakui di Tunisia sebelum adanya Arab Spring.⁴⁸ Partai pemerintah yang berkuasa adalah *Rassemblement Constituonnel Democratique* (RCD) atau dalam bahasa Inggris disebut *Democratic Constitutional Rally*, namun ada juga yang menyebutnya *Democratic Constitutional Assembly*. Partai RCD pada awalnya bernama partai *Neo-Destour*. Partai ini didirikan pada tahun 1934. Partai RCD merupakan pecahan dari partai *Destour* dan akhirnya memisahkan diri setelah berhasil mendominasi di pemerintahan. Partai ini awalnya dipimpin oleh Habib Bourguiba. Pada perkembangannya partai ini beberapa kali berubah nama. Pada tahun 1964 partai *Neo-Destour* mengubah namanya menjadi *Parti Socialiste Destourien* (PSD), dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Destourian Socialist Party*. Nama tersebut digunakan seiring dengan sistem sosialis yang diadopsi oleh Bourguiba. Pada tahun 1988, Ben Ali mengubah nama partai menjadi *Rassemblement Constituonnel Democratique*.⁴⁹

⁴⁸ PPI Tunisia, *Ketatanegaraan*, <http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/tatanegara.htm> diakses pada 20 Desember 2017

⁴⁹ *Democratic Constitutional Rally, Political Party Tunisia* <https://www.britannica.com/topic/Democratic-Constitutional-Rally> diakses pada 17 Januari 2017

Tujuh partai lainnya merupakan partai oposisi. Berikut adalah tujuh partai oposisi tersebut

1. *Movement des Democratess Socialistes* (MDS) atau *Democratic Socialist Movement*, berdiri pada tahun 1978 dengan aliran liberal. Awalnya partai MDS merupakan sebuah gerakan yang melawan partai PSD. MDS didirikan oleh Ahmed Mestiri, yang merupakan salah satu perdana menteri di era pemerintahan Bourguiba namun dikeluarkan karena terlibat dalam pembentukan *Tunisian Human Rights League*. MDS tetap ilegal sampai tahun 1981 ketika Perdana Menteri Mohammad Mzali yang lebih berpikiran reformasi mengizinkan partai oposisi untuk menjalankan daftar kandidat dalam pemilihan dan mengumumkan untuk secara resmi mengakui mereka jika mereka memenangkan lebih dari 5% suara.
2. *Parti de l'Unité Populaire* (PUP) atau yang dikenal dengan *Popular Unity Party* didirikan pada tahun 1981. Partai ini beraliran nasionalis Arab. Partai ini merupakan pecahan dari *Popular Unity Movement* (MUP). Partai ini didirikan oleh para anggota MUP yang tidak setuju dengan kebijakan pemimpin MUP Ahmed Ben Salah yang memboikot pemilihan. Pada tahun 1983 partai ini diakui sebagai salah satu dari dua partai oposisi resmi di Tunisia oleh perdana menteri Mohammed Mzali. Partai ini kemudian mendirikan surat kabar resmi bernama *Al-Wahada*
3. *Union Democratique Unioniste* (UDU) atau *Unionist Democratic Unions* didirikan pada 30 November 1988. Partai ini didirikan oleh Abdurrahmanne Tlili yang sebelumnya merupakan anggota RCD. Partai ini

beraliran nasionalis Arab. UDU memiliki surat kabar resmi yang bernama *Al-Watan*.

4. *Ettajdid Movement* didirikan pada 23 April 1993 oleh Ahmed Brahim, partai ini beraliran sekularisme. Partai ini juga memiliki surat kabar resmi yaitu *Attariq Al Jadid*.
5. *Parti Social Liberal* (PSL) atau *Social Liberal Party*, didirikan pada tahun 1988 dengan nama *Parti social pour le progrès*) atau dalam bahasa Inggris disebut *Social Party for Progress* dan diganti namanya pada tahun 1993 untuk merefleksikan alirannya. Partai ini beraliran liberalisme dan menjadi partai oposisi di Tunisia. Partai ini adalah anggota dari organisasi *Liberal International* dan *Africa Liberal Network*. PSL mendukung liberalisasi ekonomi termasuk privatisasi perusahaan milik negara.
6. *Parti démocrate progressiste* (PDP), atau *Progressive Democratic Party* adalah partai beraliran sekuler liberal di Tunisia. Partai ini didirikan pada tahun 1983 namun baru diresmikan oleh pemerintah pada 12 September 1988.
7. *Forum démocratique pour le travail et les libertés* (FDTL) atau dikenal dengan *Ettakatol* dan dalam bahasa Inggris disebut *Democratic Forum for Labour and Liberties* adalah partai yang beraliran sosial demokrasi. FDTL didirikan pada 9 April 1994 namun baru diakui pemerintah pada 25 Oktober 2002. Partai ini didirikan oleh Mustapha Ben Jabar. *Ettakatol* merupakan anggota dari kelompok oposisi yang bernama *18 October Coalition for Rights and Freedoms* bersama *Progressive Democratic*

Party,, *Communist Party of Tunisian Workers* dan beberapa kelompok islamis lainnya

1. Demokrasi di Tunisia era Habib Bourguiba

Pemerintahan Bourguiba banyak melakukan perubahan ke arah kemajuan yang cenderung bersifat modernisasi dan westernisasi.⁵⁰ Reformasi sosial terutama difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, partisipasi wanita dan perbaikan ekonomi. Pada tahun 1960-an, pemerintah mempraktekkan sistem kebijakan sosialis, tetapi kemudian kembali ke pola liberalisme dengan mempertahankan keterlibatan negara pada beberapa sektor substansial ekonomi.

PSD mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh Presiden Bourguiba. Bourguiba tahun 1961 mengenalkan program baru bagi pembangunan negara Tunisia yang dia sebut sebagai “*Destourian Socialism*”.⁵¹ *Destourian Socialism* menurut Bourguiba merupakan ideologi bangsa yang sosialis namun berlawanan dengan komunisme. Program pembangunan *Destourian Socialism* terdiri atas pembangunan pada aspek sosial dan ekonomi. Reformasi Bourguiba juga termasuk pada kehidupan sosial dan ekonomi. Bourguiba merubah hukum Islam yang sudah diterapkan oleh Tunisia menjadi sistem hukum yang bergaya barat. Bourguiba berupaya untuk memodernkan Tunisia, hal ini disebabkan oleh

⁵⁰ Ahmad Sukandi, *Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1857-1987)* hlm. 101 <https://media.neliti.com/media/publications/58090-ID-none.pdf> diakses pada 18 Januari 2018

⁵¹ Dwi Wahyu Anggorowati, 2014, *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali di Tunisia tahun 2011*, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/22749/1/SKRIPSI.pdf> diakses pada 15 Desember 2017 hlm.. 40-49

pemikiran Bourguiba yang sekuler. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bourguiba salah satunya adalah memasukkan perempuan ke sekolah-sekolah dan menyamaratakan derajat perempuan dengan laki-laki. Reformasi sekuler yang dilakukan oleh Bourguiba mempunyai keburukan. Keburukan-keburukan tersebut adalah larangannya terhadap perempuan untuk mengenakan jilbab, poligami, dan kepemilikan tanah oleh pemimpin agama.

Kebijakan yang diterapkan oleh Bourguiba tersebut bertentangan dengan hukum Islam, misalnya hukum Islam yang benar adalah mewajibkan kaum muslim untuk mengenakan jilbab. Kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal dan melanggar hukum Islam tersebut yang mendorong terbentuknya gerakan Islam fundamentalis yang militan, yaitu *Mouvement de Tendance Islamique* (MTI). Ben Ali sebagai orang kepercayaan Presiden Bourguiba melakukan tindakan pembersihan terhadap gerakan MTI. Pembersihan gerakan ini dilakukan dengan penangkapan anggota MTI. Ben Ali dan pendukungnya melakukan penangkapan terhadap 90 militan termasuk di dalamnya adalah Rached Gannouchi yang merupakan emir dari MTI. Sejumlah anggota MTI yang tertangkap termasuk Rached Gannouchi rencananya akan dijatuhi hukuman gantung, tetapi kemudian diasingkan ke London, Inggris.

Pada era Bourguiba telah beberapa kali dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dengan sistem satu partai dan memilih presiden yang dilakukan pada hari yang sama dengan surat suara yang terpisah. Partai yang menjadi peserta saat itu hanyalah partai PSD. Pemilu tersebut dilaksanakan pada tahun 1969, 1974, 1979, 1981, dan 1986. Pemilih di Tunisia adalah warga yang berusia 20 tahun ke atas, baik laki-laki atau perempuan boleh memberikan suaranya dalam

pemilu. Pada era Bourguiba kursi-kursi di parlemen di isi oleh orang-orang dengan profesi tertentu dan masing-masing profesi memiliki kuota di parlemen. Anggota parlemen di Tunisia tidak hanya laki-laki namun juga perempuan, namun kursi untuk perempuan tidak banyak. Pada pemilu presiden Bourguiba selalu menjadi satu-satunya kandidat dan selalu menjadi pemenang pemilu.

Bourguiba menjadi presiden yang diktator dan tidak disukai oleh rakyatnya. Presiden pertama Tunisia ini beberapa kali terpilih menjadi Presiden karena politik Tunisia didominasi olehnya, sehingga kekuasaannya semakin besar. Habib Bourguiba dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup pada 1975. Bourguiba selalu ikut campur dalam berbagai urusan dan pengambilan keputusan. Perdana Menteri Mohammed Mzali yang menjabat pada era Bourguiba hanya dapat mengikuti setiap keputusan yang diambil Bourguiba. Mzali juga membangun kekuatannya di pemerintahan dengan cara bergabung bersama pendukung Bourguiba.

Bourguiba juga memanipulasi berbagai kelompok oposisi dengan mendukung salah satu untuk menjatuhkan atau mendapatkan dukungan dari kelompok yang lain. Contohnya Bourguiba mencari dukungan dari *Communist Party of Tunisia* (PCT), Bourguiba menentang *Islamic Fundamentalist* di tahun 1970-an. Namun ia baru mengakui PCT sebagai oposisi resmi pada tahun 1982 setelah dukungan dan popularitas PCT menurun.

Untuk menjaga eksistensi rezim sekulernya, Bourguiba menentang gerakan dan kelompok yang berbasis agama. Bourguiba menunjukkan toleransi politiknya dengan mengizinkan dua partai lain yaitu MDS dan PUP. Namun dua partai tersebut tidak banyak memiliki pengaruh sebagai oposisi. Hal ini karena

pendukungnya tidak banyak dan berasal dari kaum menengah ke bawah Tunisia. Dalam membangun perekonomian negara, Bourguiba menggunakan *Union Générale Tunisienne du Travail* (UGTT) sebagai pendukung program jangka panjang pembangunan ekonomi dan sosial.⁵²

Bourguiba digulingkan melalui kudeta damai tanggal 7 November 1987 oleh Zen El Abidine Ben Ali. Kala itu Ben Ali menjabat sebagai Perdana Menteri Tunisia. Dikatakan kudeta damai karena keputusan tim dokter yang menyatakan bahwa Bourguiba sudah mengalami penyakit ketuaan dan tidak dapat mengemban tugas sebagai Presiden sehingga harus diputuskan untuk diturunkan. Ben Ali kemudian diangkat menjadi Presiden Tunisia setelah lengsernya Bourguiba.

2. Demokrasi di Tunisia era Zine El Abidine Ben Ali

Rakyat Tunisia berharap dengan bergantinya presiden maka rakyat akan terbebas dari kepemimpinan yang otoriter, kenyataannya kepemimpinan Ben Ali tidak jauh berbeda dengan kekuasaan Bourguiba. Ben Ali menjadi presiden yang diktator dan otoriter. Pada masa pemerintahannya jumlah pelanggaran terus meningkat, banyak pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan pers sangat dibatasi, bahkan Ben Ali melakukan tindak korupsi yang merugikan negara.

Saat mengambil alih kekuasaan Ben Ali berjanji untuk membuka negara, secara politik dan ekonomi, dan untuk membuka jalan menuju demokrasi. Pada awal pemerintahannya Ben Ali meringankan undang-undang yang membatasi pers

⁵² *National Intelligence Estimate, 1894, Prospects for Tunisia, Director Central Intelligence*, hlm. 12 <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87T00126R001101570007-8.pdf> diakses pada 8 April 2018

dan membebaskan banyak tahanan politik yang telah dipenjara di bawah rezim lama. Banyak partai politik disahkan, dan MTI yang sekarang di bawah bendera *Ennahda*, diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu 1989, sebagai independen. Tetapi ketika hasil pemilu menunjukkan tingkat kekuatan Islamis, Ben Ali memalsukan hasil, mengklaim telah memperoleh 99 persen suara. Pada saat yang sama, munculnya faksi-faksi kekerasan dalam gerakan Islamis berfungsi sebagai dalih untuk melakukan tindakan keras nasional terhadap kaum konservatif religius Tunisia.

Sementara hanya minoritas Islamis yang menganjurkan kekerasan untuk menggulingkan rezim, Ben Ali dan rezim sekulernya segera mengecam seluruh gerakan Islamis sebagai 'teroris'. Namun, Ben Ali sadar bahwa ia tak bisa menyingkirkan minoritas, Ben Ali memutuskan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan agama. Ben Ali mendirikan kementerian agama dan membangun masjid. Dia menekankan religiusitas pribadinya sendiri dengan mengumumkan di depan umum bahwa Ramadhan harus diamati dan dengan meluncurkan kampanye propaganda yang menunjukkan kepadanya ziarah ke Mekkah, dengan demikian ia mencoba membedakan dirinya dari pendirian sekuler Bourguiba.

Sebelum menjadi Presiden Tunisia, Ben Ali merupakan kepala keamanan militer Tunisia. Ben Ali juga ditunjuk untuk mendirikan Departemen Keamanan Militer. Departemen Keamanan Militer merupakan induk dari satuan polisi rahasia Tunisia. Ben Ali membentuk Departemen Keamanan Militer ketika Tunisia masih dipimpin oleh Presiden Habib Bourguiba. Pemerintahan Bourgaiba yang otoriter membutuhkan penopang untuk melindungi kekuasaannya, sehingga yang bertugas

melindungi pemerintah Bourguiba adalah Departemen Keamanan Militer yang di dalamnya terdapat satuan polisi rahasia.

Satuan polisi rahasia dibentuk untuk melaksanakan tugas dari Presiden secara langsung dan melindungi Presiden. Sama seperti Bourguiba, Ben Ali menggunakan polisi rahasia sebagai perlindungannya selama menjadi presiden. Polisi rahasia juga menjadi salah satu alat bagi presiden untuk berlaku sewenang-wenang karena polisi rahasia bekerja sesuai perintah presiden. Satuan polisi rahasia juga mempunyai peran yang sama ketika aksi demonstrasi rakyat Tunisia berlangsung. Demonstrasi tersebut adalah gerakan masyarakat Tunisia untuk menumbangkan rezim Ben Ali yang diktator. Polisi rahasia atau polisi khusus berperan dalam kasus pelanggaran HAM terhadap para jurnalis dan demonstran. Kekerasan dan penganiayaan dilakukan kepada orang-orang yang tidak setia terhadap rezim Ben Ali.

Setelah itu, Ben Ali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Tunisia.⁵³ Selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, yaitu pada 1986 Ben Ali mempunyai jasa besar dalam menghilangkan pengaruh *Mouvement de Tendance Islamique* (MTI) merupakan sebuah kelompok yang menentang kelompok sekuler reformasi Presiden Bourguiba. MTI muncul tahun 1980 sebagai kelompok fundamentalis utama. Partai yang dominan di Tunisia adalah Partai Sosialis Destour (PSD) yang merupakan bentuk baru dari *Neo-Destour*. Presiden Bourguiba mengizinkan partai di luar PSD, namun MTI ditolak oleh Presiden karena ideologi yang berbeda.

⁵³ Ibid, hlm. 40-49

Masalah mengenai MTI kemudian dipercayakan kepada Ben Ali. Berkat upaya Ben Ali dalam melakukan pemusnahan terhadap gerakan MTI, dia dianggap menyelamatkan Tunisia dari sebuah perang. Perjuangan Ben Ali membersihkan gerakan MTI memberikan nama baik kepada dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri. Bourguiba akhirnya memutuskan untuk mengangkat Ben Ali sebagai Perdana Menteri pada Oktober 1987. Ben Ali menjabat Perdana Menteri segera setelah Ia menjadi Sekretaris Jenderal *Partij Socialiste Destourien* (PSD). Setelah menjadi sekretaris jenderal PSD, Ben Ali mengubah nama partainya menjadi *Rassemblement Constitutionnel Democratique* (RCD).

Perdana Menteri yang menjabat sebelum Ben Ali adalah Muhammad Mzali. Mzali turun dari jabatannya karena berbagai permasalahan ekonomi, politik dan agama yang terjadi di Tunisia. Mzali menyerah pada tekanan internasional untuk menghapus subsidi untuk bahan makanan pokok dengan alasan untuk menyelamatkan perekonomian. Muhammad Mzali menjabat sebagai Perdana Menteri selama tahun 1980 hingga 1986. Ketika Ben Ali naik jabatan sebagai Perdana Menteri, kesehatan Presiden Bourguiba semakin buruk. Presiden Bourguiba yang berumur 81 tahun beberapa kali bertahan dari serangan jantung dan berbagai gangguan kesehatan lainnya.

Terpilih menjadi Presiden, Ben Ali berupaya untuk melepaskan Tunisia dari politik keras Bourguiba. Masa Bourguiba, Tunisia mempunyai sistem partai tunggal dengan Partai *Destour* sebagai partai dominan. Ben Ali bertekad untuk menghapuskan politik Tunisia dari sistem partai tunggal. Upaya Ben Ali adalah dengan menghapuskan pembatasan kebebasan dan memberikan hak-hak kepada partai politik berdasarkan latar belakang bahasa, ras dan agama. Dewan

menghapuskan ketentuan konstitusional yang menentukan posisi Bourguiba sebagai Presiden seumur hidup yang dirancang secara sengaja bagi Bourguiba. Selanjutnya ditetapkan bahwa Presiden Tunisia hanya menjabat selama maksimal tiga periode masa jabatan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kekuasaan yang dominan dan diktator serta otoriter. Rakyat Tunisia berharap besar kepada Presiden Ben Ali agar dalam kepemimpinannya mampu merubah kehidupan mereka menjadi lebih bebas dan terhindar dari pemimpin yang diktator.

Masa awal kepemimpinannya, Ben Ali berhasil meningkatkan perekonomian Tunisia. Tunisia bergabung dalam *European Union* (EU) tahun 1995. Berkat bergabung dalam perserikatan tersebut Tunisia mampu meningkatkan hasil ekspor karena komoditas seperti zaitun dan jeruk sangat diminati pasar EU. Pada 1987, Ben Ali memproklamkan era baru bagi Tunisia berdasarkan pada hukum, HAM, dan demokrasi. Ben Ali menyatakan bahwa partai tunggal tidak dapat mewakili seluruh rakyat Tunisia. Partai-partai politik di luar Partai Destour diharapkan mampu bersaing secara sehat dalam mensejahterakan rakyat Tunisia. Muncul partai-partai politik dengan berbagai ideologi yang diusung, seperti *Movement of Socialist Democrats* (MDS) dan *The Islamic Tendency Movement* (MTI).

Keberhasilan Ben Ali dalam merebut hati rakyat tidak terlepas dari usahanya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga terus berupaya menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, seperti perubahan Undang-Undang (UU) sistem pemilu yang memungkinkan partai oposisi terwakili dalam parlemen, meskipun jumlah pemilihnya sangat kecil. Karenanya, perubahan UU tersebut mendapat tanggapan positif dari sebagian besar kelompok oposisi. Pemerintah Tunis sebenarnya masih kaku terhadap kelompok oposisi, seperti menerapkan

pengawasan ketat terhadap para mantan tahanan politik. Kebebasan partai masih terbatas, hingga tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan kebijakan pemerintah.

Tunisia memiliki catatan bagus dalam pengelolaan keuangan. Tunisia dipuji oleh *International Monetary Fund* (IMF), karena fondasi ekonomi yang solid dan upaya nyata modernisasi. Tunisia juga dijadikan model untuk bebas buta aksara, kesejahteraan sosial, dan peran perempuan dalam masyarakat. Tunisia terhitung relatif sekuler dan pemain moderat di dunia Arab sehingga menjadi sekutu diplomatik serta bisnis AS dan Eropa. Meskipun dikritik kelompok hak asasi manusia, banyak pemilih Tunisia melihat keberlanjutan kekuasaan ini baik untuk negaranya. Mereka memuji Ben Ali telah membuat Tunisia negara yang paling makmur dan stabil di kawasan serta mampu menarik jutaan turis Eropa setiap musim panas. Bahkan lawan Ben Ali sekalipun mengakui pencapaian yang diraihinya di negara itu.⁵⁴

Tunisia pada era Ben Ali telah melaksanakan pemilu sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1989, 1994, 1999, 2004 dan 2009. Pada pemilu-pemilu tersebut Ben Ali selalu keluar sebagai pemenang kursi presiden Tunisia dari partai RCD. Pada pemilu 1989, pemilu yang diselenggarakan adalah untuk memilih anggota parlemen dengan sistem sama seperti yang diterapkan Bourguiba. Ben Ali memperkenalkan pluralisme politik pada Dewan Perwakilan di tahun 1993.

⁵⁴ Kompas.com, 2009, *Sudah 22 Tahun Ben Ali Berkuasa*, <http://internasional.kompas.com/read/2009/10/26/05564739/Sudah.22.Tahun.Ben.Ali.Berkuasa> diakses pada 21 Januari 2018

Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang pemilu. Ben Ali juga mengumumkan pemilu pertama akan diselenggarakan pada bulan Maret 1994.

Pemilu pertama Tunisia era Ben Ali dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Dewan Perwakilan dan Presiden. Masa kampanye berlangsung dari tanggal 6 sampai 18 Maret. Sebagai hasil dari Undang-undang Pemilu yang baru, enam partai oposisi yang dibentuk secara hukum menantang RCD, yang sebelumnya memegang semua kursi di Parlemen. Di sisi lain, partai Islam Al-Nahda atau *Ennahda* dilarang tampil. Pemilu diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 1994. Secara keseluruhan ada 630 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 163 kursi. RCD berhasil memperoleh 144 dari 163 kursi yang ada. Ben Ali kembali terpilih sebagai Presiden Tunisia dengan perolehan 99 persen suara dan menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilu. Dari 163 kursi di Parlemen 152 kursi diduduki oleh laki-laki dan 11 kursi diduduki oleh perempuan.⁵⁵ Dibawah ini merupakan hasil perolehan suara dan kursi masing-masing partai peserta pemilu legislatif Tunisia tahun 1994

⁵⁵ *Tunisia Parliamentary Chamber: Majlis Al-Nawab election held in 1994*, http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321_94.htm diakses pada 20 Januari 2018

Tabel 1. Hasil perolehan suara pemilu Tunisia tahun 1994

No	nama partai	perolehan suara	persentase suara	jumlah kursi
1	Democratic Constitutional Rally	2.768.667	97,73	144
2	Democratic Socialist Movement	30.660	1,08	10
3	Renovation Movement	11.299	0,4	4
4	Unionist Democratic Union	9.152	0,32	3
5	Popular Unity Party	8.391	0,29	2
6	Social Party for Progress	1.892	0,07	0
7	Progressive Socialist Assembly	1.749	0,06	0
8	Independent	1.061	0,04	0

Sumber: *Inter-Parliamentary Union*

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 20 Oktober 1999. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Presiden dan anggota parlemen. Pemilu ini diikuti oleh tiga kandidat yaitu zine El Abidine Ben Ali, Aberahmane Tlili, dan Mohammed Belhai Amor. Pada pemilu ini Ben Ali kembali keluar sebagai pemenang dan kembali menduduki kursi Presiden Tunisia dengan perolehan suara sebesar 99,45 persen. Berikut perolehan suara yang didapat masing-masing kandidat pada pemilu presiden tahun 1999

Tabel 2. Hasil perolehan suara pemilu Presiden Tunisia tahun 1999

No	nama kanidat	Asal partai	jumlah suara
1	Zine El Abidine Ben Ali	RCD	3.269.067
2	Mohammed Belhai Amor	PUP	10.594
3	Aberahmane Tlili	UDU	7.560

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber

Pada pemilu legislatif RCD kembali mendominasi di parlemen dengan perolehan kursi sebanyak 148 dari 182 kursi yang diperebutkan. Dari 182 kursi, 161 kursi ditempati oleh laki-laki dan 21 kursi ditempati oleh perempuan. Berikut hasil perolehan kursi dari masing-masing partai pada pemilu legislatif Tunisia tahun 1999

Tabel 3. Hasil pemilu legislatif Tunisia tahun 1999

No	nama partai	jumlah kursi
1	Democratic Constitutional Rally	148
2	Democratic socialist Movement	13
3	Popular Unity Party	7
4	Unionist Democratic Union	7
5	Renovation Movement	5
6	Liberal Social Party	2

Sumber: *Inter-Parliamentary Union*

Pemilu selanjutnya diselenggarakan pada 24 Oktober 2004 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan dan Presiden Tunisia. Pemilu Presiden Tunisia tahun 2004 diikuti oleh empat kandidat, yaitu Zine El Abidine Ben Ali, Mohamed Bouchiha, Mohamed Ali Halouani dan Mounir Beji. Pada putaran pemilu Presiden dimenangkan oleh Ben Ali kembali dengan persentase suara sebesar 94,49%. Berikut data hasil perolehan suara pemilu Presiden Tunisia tahun 2004

Tabel 4. Hasil perolehan suara pada pemilu Presiden Tunisia tahun 2004

No	nama kanidat	jumlah suara
1	Zine El Abidine Ben Ali	4.204.292
2	Mohmed Bouchiha	167.986
3	Mohamed Ali Halouani	42.213
4	Mounir Beji	35.067

Sumber: *ElectionGuide Democracy Assistance and Election News*,

Pada pemilu tahun 2004, dihari yang sama juga dilaksanakan pemilihan anggota parlemen. Partai RCD masih mendominasi pemilu legislatif Tunisia. Berikut adalah hasil pemilu legislatif Tunisia tahun 2004

Tabel 5. Hasil perolehan suara pemilu legislatif Tunisia tahun 2004

No	nama partai	perolehan suara	persentase suara	jumlah kursi
1	Democratic Constitutional Rally	3.678.645	87,59	152
2	Democratic socilist Movement	194.829	4,63	14
3	Popular Unity Party	152.987	3,64	11
4	Unionist Democratic Union	92.708	2.20	7
5	The Ettajdid Movement	43.268	1,74	3
6	Liberal Social Party	25.261	0,6	2
7	partai lain	10.473	0,26	0

Sumber: *ElectionGuide Democracy Assistance and Election News*

Pemilu tahun 2009 diselenggarakan pada 25 Oktober 2009. Dalam pemilu ini Ben Ali kembali memenangkan pemilu presiden Tunisia untuk yang keempat kalinya, namun persentase kemenangannya menurun. Ben Ali menang dengan persentase suara sebesar 89,62 persen. Posisi kedua ditempati oleh Mohamed Bouchiha dari partai PUP yang memperoleh 5,01 persen. Sementara itu, di posisi

ketiga adalah Ahmed Inoubli dari partai UDU yang mendapatkan 3,8 persen. Sementara itu, kandidat terakhir, Ahmed Brahim dari Ettajdid, atau gerakan perubahan, mendapatkan perolehan paling kecil dengan 1,57 persen⁵⁶

Pada pemilu legislatif, partai RCD kembali memenangkan pemilu untuk yang ke sekian kalinya. Berikut hasil pemilu legislatif tahun 2009 di Tunisia

Tabel 6. Hasil pemilu legislatif tahun 2009

Nama Partai	Jumlah kursi	Votes	%
Democratic Constitutional Rally (RCD)	161	3'754'559	84.59
Democratic Socialist Movement (MDS)	16	205'374	4.63
Popular Unity Party (PUP)	12	150'639	3.39
Unionist Democratic Union (UDU)	9	113'773	2.56
Social Liberal Party (PSL)	8	99'468	2.24
Green Party for Progress (PVP)	6	74'185	1.67
Ettajdid Movement	2	22'206	0.50

Sumber: *Inter-Parliamentary Union*

Keberhasilannya dalam perekonomian dan politik tidak berlangsung lama karena setelah sekian lama memimpin Tunisia. Ben Ali yang berjanji menghilangkan sisa kediktatoran Bourguiba justru malah mempraktekkan hal yang sama. Demokrasi yang selalu digemborkan oleh Ben Ali pada awal jabatannya terbukti tidak terlaksana dengan baik. Ben Ali selalu terpilih pada setiap pemilihan Presiden.

⁵⁶ Republika Online, 2009, *Ben Ali Kembali Menangkan Pemilu Tunisia*, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/10/27/85124-ben-ali-kembali-menangkan-pemilu-tunisia> diakses pada 19 Januari 2018

Selain permasalahan politik, pemerintahan Ben Ali juga dilanda berbagai permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi Tunisia antara lain nilai impor yang tinggi meskipun Tunisia juga banyak mengekspor, tingkat inflasi yang mencapai angka 3% per tahun serta masalah hutang luar negeri. Tunisia banyak mengandalkan hutang luar negeri untuk mendorong perekonomian masyarakat.⁵⁷

Pengangguran menjadi masalah utama yang tak kunjung selesai di Tunisia. Permasalahan pengangguran di Tunisia telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Persebaran pengangguran juga bervariasi di berbagai daerah. Namun wilayah barat laut dan barat daya Tunisia menyumbang jumlah pengangguran tertinggi. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan namun tidak memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel tingkat pengangguran Tunisia sejak tahun 1966 hingga tahun 2009

Tabel 7 tingkat pengangguran di Tunisia tahun 1966-2009

Year	1966	1975	1984	1989	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2009
Male	15,3	13,4	13,7	13,9	15	15,6	15,5	14,9	14,5	13,8	12,9	
Female	13,4	10,6	11	20,9	17,2	16,3	16,1	15,3	16	15,8	16,7	
Total	15,2	12,9	13,1	15,3	15,6	15,8	15,6	15	14,9	14,3	13,9	13,3

Sumber: Maher Gassab & Hanene B.O Jamaussi, 2014, *Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia*, Almauera, Italia hlm. 3

⁵⁷ Dwi Wahyu Anggorowati, 2014, *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali di Tunisia tahun 2011*, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/22749/1/SKRIPSI.pdf> diakses pada 15 Desember 2017 hlm.. 56-58

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perempuan yang menganggur lebih tinggi dibanding laki-laki. Jumlah pengangguran pada tahun 2000-an menunjukkan penurunan namun tak signifikan. Penurunan ini terjadi berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tunisia.

Upaya yang dilakukan pemerintah Tunisia adalah dengan menyelenggarakan program pengembangan keterampilan. Pembukaan lapangan pekerjaan juga diutamakan bagi usia produktif mengingat jumlah pengangguran tertinggi terdapat pada usia muda. Hampir sepertiga pengangguran memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan dua pertiga dari tuntutan pekerjaan tambahan yang berasal dari kategori pencari kerja ini. Tunisia telah mengalami penyumbatan mobilitas sosial selama beberapa tahun, tanda kegagalan kebijakan ekonomi dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga menjanjikan untuk memberikan biaya hidup bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bukan merupakan solusi yang tepat. Bisa saja masyarakat malah menjadi tergantung pada uang bulanan yang mereka dapatkan dari pemerintah dan tidak berupaya untuk mencari pekerjaan.

Selama tahun 2001-2009, rata-rata 73.300 pekerjaan telah diciptakan setiap tahun untuk mencapai total 659.700 pekerjaan yang dibutuhkan. dengan jumlah pekerjaan yang dibuka mampu menyerap 89,3% dari permintaan lapangan pekerjaan tambahan. Namun, penciptaan lapangan pekerjaan tersebut hanya menyerap pengangguran dari lulusan sekolah menengah daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Ini mencerminkan salah satu kelemahan mendasar dari pasar tenaga kerja Tunisia, yaitu ketidaksesuaian permintaan tenaga kerja dengan pengangguran yang tersedia bahkan peningkatan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Memang, selama periode 2001-2007, pekerjaan

yang diciptakan untuk lulusan sekolah menengah mencakup 71,7% dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Sementara pada periode yang sama, permintaan lapangan pekerjaan untuk lulusan universitas rata-rata 41% dari permintaan global, sedangkan pekerjaan yang diciptakan rata-rata menyumbang 34,2%. Kebijakan ekonomi di bawah Ben Ali mengikuti standar Eropa, termasuk penetapan Upah Minimum Regional. Perkembangan sektor teknologi tinggi dibatasi oleh pemerintah sehingga pekerjaan yang sesuai untuk lulusan universitas menjadi langka.⁵⁸

Permasalahan sosial lain yang menjadi sorotan adalah tentang masalah perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan pers. Secara hukum Ben Ali telah melakukan pelanggaran HAM. Sejak Ben Ali menjabat menjadi Presiden pers dibatasi ruang geraknya. Jurnalis tidak boleh mengeluarkan berita yang merusak nama baik, dan fitnah terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang paling disoroti adalah perlakuan terhadap wartawan Taufik Ben Brik yang dilecehkan dan dipenjarakan atas kritiknya kepada Ben Ali. Ben Ali berusaha menutup-nutupi kelemahan pemerintahannya. Jurnalis yang melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi penjara hingga lima tahun. Selama Ben Ali mengeluarkan peraturan tersebut sudah ada 100 jurnalis Tunisia yang dipenjarakan. Permasalahan yang dihadapi oleh para jurnalis selama bertahun-tahun ini menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah Ben Ali, karena para jurnalis melakukan serangan balik terhadap pemerintah dengan bergabung melawan pemerintah.⁵⁹

⁵⁸ Maher Gassab & Hanene B.O Jamaussi, 2014, *Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia*, Almauera, Italia hlm. 3-6

⁵⁹ Op cit hlm. 58-59

Ekonomi terhambat oleh penyalahgunaan wewenang dalam penerapan undang-undang dan peraturan, proses pengadaan yang tidak efisien, privatisasi yang dicurangi, deklasifikasi aset lahan publik, dan penyalahgunaan bank publik. Proses pengambilan keputusan yang sangat terpusat melemahkan sistem *checks and balances*, sehingga menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang rendah. Secara lebih umum, penyalahgunaan wewenang dipraktekkan dalam penerapan hukum. Kurangnya partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai memperburuk ketidakadilan penduduk.

"Keluarga" Ben Ali menggunakan posisinya untuk terlibat dalam kegiatan pencarian keuntungan. Mereka menggunakan koneksi politik yang dimiliki untuk memperkaya diri mereka. Hal yang mereka lakukan seperti memonopoli pasar, membuat peraturan yang menguntungkan mereka sendiri hingga korupsi secara langsung. Mereka juga menempatkan orang-orang yang bisa diajak "kerjasama" di pemerintahan sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan lisensi, izin, dan kontrak yang menguntungkan bagi merek sendiri.

Selama bertahun-tahun, Ben Ali mengeluarkan 22 keputusan kepresidenan yang menghasilkan 73 amandemen terhadap kode etik bisnis. Kadang-kadang hal ini dibuat untuk mengakomodir kepentingan mereka sendiri. Pada tahun 2007, misalnya, aturan dibuat mengharuskan otorisasi pemerintah untuk perusahaan yang memproduksi semen. Ini terjadi persis ketika saudara ipar laki-laki Ben Ali mendirikan sebuah perusahaan baru bernama *Carthage Cement*.⁶⁰

⁶⁰ Paul Rivlin, 2014, *Tunisia: What Ben Ali Stole*, Tel Aviv University hlm 5

Rakyat Tunisia yang sudah tidak tahan dengan pemerintahan Ben Ali yang diktator dan tidak juga membawa kesejahteraan rakyatnya. Namun rakyat Tunisia saat itu tidak dapat berbuat apa-apa. Keterbatasan ruang gerak membuat rakyat hanya bisa tunduk pada pemerintahan Ben Ali.

Warga Tunisia akhirnya menemukan jalan keluar setelah sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa tersebut adalah aksi bakar diri yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Mohammed Bouazizi. Bouazizi adalah seorang sarjana yang sulit mendapatkan pekerjaan dan memutuskan berjualan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhannya. Bouazizi berasal dari kota Sidi Bouzid. Namun karena dinilai tidak memiliki izin usaha ia terjaring razia oleh polisi setempat. Ketika terjaring razia, ia sempat melakukan perlawanan dengan polisi namun dibalas dengan makian dan siksaan. Tak terima dengan perlakuan polisi, ia kemudian datang ke kantor Gubernur untuk mengadukan perlakuan polisi terhadapnya dan mengancam akan membakar diri apabila kedatangannya diabaikan. Namun Gubernur tetap tak menghiraukan ancamannya. Kesal dengan reaksi Gubernur ia kemudian membakar dirinya di depan kantor Gubernur.

Bouazizi dilarikan ke rumah sakit setelah membakar dirinya kemudian dipindahkan ke rumah sakit kota Ben Arous, dekat Tunis. Di sana ia menjalani perawatan di Trauma Centre dan Burn. Presiden Tunisia, Zein al-Abidin Ben Ali, sempat menjenguknya di rumah sakit. Namun semua sudah terlambat dan tidak mampu menyelamatkan nyawa pedagang kaki lima tersebut serta menyelamatkan kekuasaan Ben Ali. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2011 atau 17 hari telah aksinya tersebut, Bouazizi menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari itu, kurang lebih 5000 orang ikut ambil bagian dalam proses pemakamannya.

Keesokan harinya, Bouazizi dimakamkan di pemakaman Bennour Garat, 10 mil dari Sidi Bouzid.

Aksi bakar diri tersebut menyulut amarah warga Tunisia terhadap pemerintahan Ben Ali. Satu hari setelah Bouazizi membakar dirinya massa kemudian turun melakukan unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan di kota tersebut, bahkan aparat sempat kewalahan mengatasi kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah jejaring sosial seperti *Facebook* dan *YouTube* menyorot beberapa gambar dari aksi tersebut. Dalam upayanya untuk memadamkan kerusuhan itulah, Presiden Ben Ali mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal.

Kunjungan Ben Ali tidak berhasil memadamkan semangat perlawanan dari rakyatnya. Setelah kematian Bouazizi, gerakan perlawanan terus terjadi hingga kekerasan meningkat terus menerus, bahkan semakin mendekati ibukota negara, Tunis. Pada tanggal 27 Desember 2010, sekitar 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouzid mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menentang pemerintahan. Pada saat yang sama, sekitar 300 pengacara mengadakan sebuah aksi demo dekat pemerintahan istana di Tunis. Demonstrasi kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Desember.

Pada tanggal 30 Desember 2010, aparat membubarkan demonstrasi damai di Monastir dengan menggunakan kekerasan untuk mengganggu demonstrasi lebih lanjut di Sbikha dan Cebba. Momentum kembali untuk melanjutkan dengan demonstrasi pada tanggal 31 Desember 2010, ketika dilakukan demonstrasi dan pertemuan umum oleh pengacara di Tunisia dan kota-kota lainnya menyusul seruan oleh Kelompok Pengacara Nasional Tunisia, Mokhtar Trifi, selaku

Presiden Tunisia Liga Hak Asasi Manusia atau *Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme* (LTDH) mengatakan bahwa pengacara di Tunisia telah secara kejam dianiaya dan “dipukuli”.

Tanggal 3 Januari 2011, demonstrasi dilakukan dekat kota Thala dengan mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup, namun akhirnya demonstrasi tersebut berubah menjadi anarkis (kekerasan). Demonstrasi yang diikuti kurang lebih 250 orang tersebut diikuti sebagian besar mahasiswa sebagai upaya untuk mendukung aksi para demonstran di Sidi Bouzid. Sebagai responsnya, para pengunjuk rasa dilaporkan telah membakar ban dan menyerang kantor RCD. Menanggapi aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan, aparat mengirim pasukan anti huru-hara untuk membubarkan para demonstran karena merusak bangunan, membakar ban, membakar sebuah bus, dan membakar dua mobil kelas pekerja pinggiran dari Ettadhame-Mnihla di Tunis. Aparat militer juga dikerahkan di banyak kota di seluruh negeri.

Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi protes massa tersebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk pemberitaan masif dari Al-Jazeera yang diambil langsung oleh masyarakat Tunisia, melalui kamera telepon seluler dan kemudian disebarluaskan melalui YouTube dan Facebook dan kemudian disebarluaskan lagi melalui Twitter, bahkan kabel pemberitaan Wikileaks. Peran media yang memberitakan kekejaman aparat rezim di bawah rezim Ben Ali tersebut yang menjadi faktor penting dan utama bangkitnya gerakan massa untuk menggulingkan Ben Ali yang tidak lagi mampu ditangani oleh aparaturnya.

Aksi unjuk rasa yang terus menerus akhirnya membuat Ben Ali menyerah. Pada 13 Januari 2011, ia mengumumkan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan

diri lagi untuk masa jabatan 2014, sekaligus bersumpah akan meningkatkan kebebasan pers dan perekonomian. Satu hari setelahnya Ben Ali mengundurkan diri dari jabatannya dan melarikan diri ke Arab Saudi. Tahun 2011 merupakan tahun berakhirnya karir Ben Ali dalam pemerintahan maupun militer karena Ben Ali akhirnya dihukum penjara seumur hidup.⁶¹

Pada tahun 2011, setelah revolusi, pemerintah memulai proses penyitaan. Penyitaan ini melibatkan aset dari 114 individu, termasuk Ben Ali sendiri dan kerabatnya serta terkait dengan aset yang diperoleh dari tahun 1987 hingga masa jabatannya berakhir. Aset yang disita adalah 550 properti, 48 kapal dan perahu, 40 portofolio saham, 367 rekening bank dan sekitar 400 perusahaan yang tidak semuanya beroperasi di Tunisia. Nilai estimasi aset ini secara resmi adalah sekitar 13 miliar dollar Amerika, sama dengan lebih dari seperempat dari PDB 2011 di Tunisia.⁶²

Bank Dunia menggunakan data pajak yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Tunisia terkait dengan lebih dari 600.000 perusahaan. Mereka menemukan bahwa antara tahun 1996 dan 2010, 220 perusahaan yang dimiliki oleh Ben Ali dan kerabatnya menyumbang 3 persen aset dan menghasilkan 21 persen dari seluruh keuntungan sektor swasta negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang dimiliki oleh klan Ben Ali lebih besar dari pesaing mereka dan kinerja mereka lebih unggul daripada yang lain. Ini dimungkinkan karena mereka aktif dalam sektor-sektor ekonomi yang diatur dan

⁶¹ Ahmad Sahide, 2015, *The Arab Spring : Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal 121-122 ,<http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187> diakses pada 18 Desember 2016

⁶² Op cit

peraturan-peraturan ini digunakan untuk mencegah persaingan dari perusahaan di luar klan, termasuk investasi dari luar negeri. Laporan itu menyatakan bahwa kerangka regulasi dimanipulasi oleh pihak berwenang demi perusahaan yang dimiliki oleh klan. Regulasi yang dibuat oleh Ben Ali digunakan untuk kepentingan sendiri serta klan.⁶³

•

⁶³ *ibid*

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “Transisi Demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring*” maka peneliti menyimpulkan:

1. Pencapaian demokrasi di Tunisia masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari indikator demokrasi yang dikemukakan Samuel Huntington. Tunisia berhasil mencapai empat dari lima indikator demokrasi Huntington. Indikator yang berhasil dicapai adalah pemilu yang bebas, adil, terbuka, adanya pembatasan kekuasaan, keadilan dalam pemilihan dan kebebasan pers, rezim non demokratis tidak mengadakan kompetisi dan tidak memberikan partisipasi suara yang luas. Indikator yang belum berhasil dicapai adalah kestabilan terhadap sistem demokrasi. Transisi di Tunisia terganggu dengan aksi terorisme yang menyebabkan kestabilan demokrasi dan keamanan negara terganggu. Terorisme juga menyebabkan ekonomi negara sulit berkembang.
2. Tipe transisi di Tunisia adalah *replacement* atau pergantian. Ada 3 fase dalam replacement yaitu perjuangan menggulingkan rezim, tergulingnya rezim dan perjuangan setelah tergulingnya rezim. Fase pertama transisi di Tunisia adalah upaya penggulingan rezim Ben Ali melalui unjuk rasa.

Pengganti pelaksana pemerintahan sementara setelah tergulingnya Ben Ali adalah Mohammed Ghannouchi yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri. Fase kedua yaitu tergulingnya rezim terjadi ketika Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi. Sikap Ben Ali dianggap warga Tunisia sebagai pengunduran diri Ben Ali. Pasca tergulingnya Ben Ali Tunisia memasuki fase ketiga yaitu perjuangan setelah tergulingnya rezim. Perjuangan warga Tunisia pasca tergulingnya rezim adalah membentuk sebuah rezim baru. Rezim baru terbentuk dengan cara yang lebih demokratis. rezim yang terbentuk setelah tergulingnya Ben Ali adalah rezim Ennahdha yang dipilih melalui pemilu pada tahun 2011 dan rezim Beji Caid Essebsi dipilih melalui pemilu Tunisia tahun 2014..

B. Saran

Dari studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan terkait transisi demokrasi di Tunisia pasca *Arab Spring*, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Tunisia harus mampu memberantas terorisme agar kestabilan negara tetap terjaga dan proses demokratisasi tetap berlangsung. Upaya tambahan yang dapat dilakukan seperti membuat undang-undang tentang terorisme sehingga Tunisia memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberantas terorisme.
2. Pemeintah Tunisia harus membuat beberapa undang-undang yang mengatur tentang beberapa hal penting yang mendukung demokrasi dan membentuk lembaga resmi diantaranya Undang-undang tentang pers,

peresmian ISIE sebagai lembaga resmi negara yang mengatur penyelenggaraan pemilu.

3. Dengan terbukanya hubungan luar negeri Tunisia, pemerintah Tunisia diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain, terutama negara tetangga agar kestabilan baik ekonomi, politik dan keamanan kawasan dapat terwujud. Kerjasama dalam mengatasi terorisme diharapkan menjadi prioritas karena terorisme menjadi masalah yang krusial di kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cresswell, John W. 1998, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publication.
- Dahl, Robert A. 1991. *On Democracy*, Yale University Press.
- Georg Serensen. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Goldstein, Eric, 2011, *Revolution in Arab World*, Washington Foreign Policy
- Hadri Nawawi. 1996. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Graffiti.
- Miles, Matthew B. & Huberman. A.M. 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. United Kingdom: Sage Publications.
- O'Donnell, Guillermo & Schmitter, Philippe C. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule*. London: John Hopkins University Press.
- Sudarto. 1995. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tamburaka, Apriadi, 2011, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Penerbit Narasi, Yogyakarta
- Yin, R.K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods 4ed*. London: Sage

Internet:

- Alfani, Age Juhdi. 2016, *Transisi Demokrasi di Libya Tahun 2011-2014*. Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75997>
- Al-Jazeera. 2016. *Tunisia: PM Essid Faces No Confidence Vote*.
<https://www.aljazeera.com/news/2016/07/tunisia-pm-essid-faces-confidence-vote-160730154728597.html>

Amnesty International. 2016, *The Arab Spring: Five Years On*.
<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>

Arab Spring: Kontraksi Demokrasi.
<http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Revolusi%20Arab%20DOWNLOAD%20SAMPLE.pdf>

BBC.2014. *Egypt Polices Jailed Over 2010 Death of Khaled Said*.
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26416964>

Democratic Constitutional Rally, Political Party Tunisia
<https://www.britannica.com/topic/Democratic-Constitutional-Rally>

Detik.com. 2015. *PM Tunisia Perintahkan Penutupan Puluhan Masjid*.
<https://news.detik.com/bbc-world/d-2953910/pm-tunisia-perintahkan-penutupan-puluhan-masjid>

ElectionGuide Democracy Assistance and Election News, *Tunisian Republic Election for President 2004*, <http://www.electionguide.org/elections/id/1942/>

<https://freedomhouse.org/>

<http://www.isie.tn/>

Jasmine Rayen. 2015. *Habib Essid interview: Tunisia's PM on why he believes his country's increasingly perilous position is the fault of Western powers Exclusive: Nation has seen a crackdown of public freedom after twin massacre.*, <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/habib-essid-interview-tunisias-pm-on-why-he-believes-his-countrys-increasingly-perilous-position-is-10441660.html>

Kompas.com. 2017. *Tunisia Perpanjang Status Darurat Hingga 4 Bulan Lagi*.
<https://internasional.kompas.com/read/2017/06/14/19384201/tunisia.perpanjang.status.darurat.hingga.4.bulan.lagi>

Kompas.com.2009. *Sudah 22 Tahun Ben Ali Berkuasa*.
<http://internasional.kompas.com/read/2009/10/26/05564739/Sudah.22.Tahun.Ben.Ali.Berkuasa>

Labieb Musaddad. 2013. *Jurnal Ilmiah Non Seminar Arab Spring. Universitas Indonesia*. lib.ui.ac.id/file?file=digital/20368972-MK-Labieb%20Musaddad.pdf

Mathiu von Rohr. 2011. *Why Tunisian's Vote for Islamists*.
<http://www.spiegel.de/international/world/victory-for-Ennahda-why-tunisians-voted-for-the-islamists-a-794133.html>

Oxford Bussiness Group. Tunisia Aims to Have Zero Enemy Foreign Policy.
<https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/good-fences-government-looks-consolidate-%E2%80%9Czero-enemy%E2%80%9D-regional-foreign-policy>

Pars Today. 2016. Tunisia, *Model Demokrasi atau Kembali ke Masa Lalu?*,
http://parstoday.com/id/radio/world-i20143-tunisia_model_demokrasi_atau_kembali_ke_masa_lalu

PPI Tunisia. *Ketatanegaraan.*
<http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/tatanegara.htm>

Profil Negara Republik Tunisia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia.
<https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx>

Republika Online.2009. *Ben Ali Kembali Menangkan Pemilu Tunisia.*
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/10/27/85124-ben-ali-kembali-menangkan-pemilu-tunisia>

Somantri, Gumilar R. 2005. *Memahami Metode Kualitatif.*
http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF_Revisi-ybs.pdf

Tempo.co. 2015. *Bom Hantam Bus Pengawal Presiden Tunisia, 12 Tewas.*
<https://dunia.tempo.co/read/722209/bom-hantam-bus-pengawal-presiden-tunisia-12-tewas>

Teori Politik dan Ideologi Demokrasi. Universitas Gadjah Mada.
elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/32057/1eca8113b2304776be65f882f93e9009

The Arab Spring, five years on.
<http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/01/daily-chart-8>

Tunisia Parliamentary Chamber: Majlis Al-Nawab election held in 1994,
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321_94.htm

Tunisia Parliamentary Chamber: Majlis Al-Nuwaab Elections Held In 1999
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321_99.htm

Tunisia Majlis Al-Nuwab (Chamber of Deputies) Elections Held In 2009,
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321_09.htm

Vote de confiance au gouvernement de Youssef Chahed. 2016.
<https://majles.marsad.tn/2014/fr/vote/57c0e020cf44123b7174acda>

Youseff Cherif, 2015, *Tunisia's Foreign Policy: A Delicate Balance*,
<http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/tunisia-s-foreign-policy-a-delicate-balance>

Jurnal:

Al- Issawi, Fatima, 2012, *Media Transition in Tunisia*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC

Alkatiri, Jeffry. 2007. *Perdebatan Teori Transisi Demokrasi*. Wacana Vol. 9 No.1 April 2007.

Anggorowati, Dwi W. 2014. *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali di Tunisia Tahun 2011*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Badu, Muhammad N. 2015. *Demokrasi dan Amerika Serikat*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015.

Gassab, Maher & Jamaussi, Hanene B.O. 2014. *Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia*. Almauera. Italia.

Huntington Samuel P. 1991. *Democracy's Third Wave*. Journal of Democracy Vol. 2 No.2 Spring 1991

Jatmika, Sidik, 2013, *The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kartini, Indriana. 2015. *Keagagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam Masa Transisi Demokrasi*. Jurnal Hubungan Internasional Tahun VIII, No.2, Juli - Desember 2015, Universitas Airlangga.

Khalil, Amira A.R. 2015. *Presidential and Legislative Elections in Tunisia*. African Perspectives Volume 12 Issue 42.
www.sis.gov.eg/newvr/42e/E542.pdf

Martin, Dominique. W. 2014, *Political transition in A Post-Arab Spring Middle East: A Comparative Analysis of Tunisia, Egypt and Yemen*, University of Central Florida, Amerika Serikat hlm.15

Martin, Ali. 2010. *Quo Vadis Transisi Demokrasi: Arah Demokratisasi Inonesia di Tengah Demokrasi Pasar*. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol 7 No.1 Januari 2010, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

National Democratic Institute. 2014. *Final Report on the 2014 Legislative and Presidential Election in Tunisia*. USAID. MEPI and Canada DFATD.

National Intelligence Estimate.1894. *Prospects for Tunisia*, Director Central Intelligence.<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87T00126R001101570007-8.pdf>

POMEPS Briefing 27. 2015. *Tunisian's Volatile Transition to Democracy*. POPMEPS. https://pomeps.org/wp-content/uploads/2015/11/POMEPS_BriefBooklet27_Tunisia_Draft31.pdf

Poti, Jamhur. 2011. *Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol. No.1 tahun 2011, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rahmat, Pupu S. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium Vol.5 No.9 Januari-

Rivlin, Paul. 2014. *Tunisia: What Ben Ali Stole*. Tel Aviv University.

Sahide, Ahmad. 2015. *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. Jurnal Hubungan Internasional vol.4 no.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Schafer, Isabel. 2015. *The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism in an Insecure Regional Context*, PapersIEMed.

Sugito. 2012. *Liga Arab dan Demokratisasi di Dunia Arab*. Jurnal Hubungan Internasional Vol.1 No.2 Oktober 2012, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sukandi, Ahmad. *Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1857-1987)*.<https://media.neliti.com/media/publications/58090-ID-none.pdf>

Tavanna, Danniell & Russel, Alexl. 2014. *Previewing: Tunisia's Parliamentary and Presidential Election*. POMED.

The Carter Center. 2011. *National Constituent Assembly Election in Tunisia:Final Report*. Tunisia.